

**IMPLEMENTASI PENETAPAN UANG *HANTARAN*
NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Masyarakat Kelurahan
Pulau Kijang Kecamatan Reteh
Kabupaten Indragiri Hilir)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**DIMAS PRAWIRO
NIM. 10821003552**

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013 M/1434 H**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Penetapan Uang *Hantaran* Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)"**.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya realita yang terjadi di masyarakat bahwasanya dalam mengimplementasikan tradisi ini, penulis melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Diantara kejanggalan dalam pelaksanaan tersebut yaitu, tradisi ini dirasakan banyak masyarakat memberatkan seseorang yang akan melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan adanya penetapan uang *hantaran* nikah yang relatif tinggi jumlahnya dari pihak perempuan, selain itu tradisi ini menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk menikah diakibatkan tidak terpenuhinya permintaan tersebut sehingga pernikahan dibatalkan. Tradisi ini juga memicu seseorang melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhi permintaan tersebut seperti menjual kebun, sawah, menggadai dan meminjam uang yang pada akhirnya mempengaruhi keharmonisan keluarganya. Selain itu juga adanya tradisi ini memicu seseorang untuk melakukan segala cara untuk bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Seperti kawin lari, dan hamil diluar nikah.

Setelah memahami dari implementasi penetapan uang *hantaran* nikah tersebut maka timbulah permasalahan bagaimanakah sebenarnya ketentuan pembiayaan *walimatul 'ursy* , pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh serta tinjauan hukum Islam terhadap implementasi dari tradisi tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan observasi, wawancara dan angket. Dari data tersebut dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu data kuantitatif yang berasal dari angket dan data kualitatif yang berasal dari observasi dan wawancara. Kemudian dari data kuantitatif dibentuklah tabulasi, dianalisa dan diambil kesimpulan sedangkan dari data kualitatif dihubungkan satu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan pendekatan deskriptif analitik.

Setelah mengkaji dan memahami dari hasil analisa implementasi penetapan uang *hantaran* nikah serta dampaknya terhadap masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dipahami bahwasanya tradisi ini sudah mengalami perubahan tidak seperti awal pertama muncul dikarenakan sering terjadinya pernikahan silang antara suku yang ada pada masyarakat tersebut. Permintaan ini hanyalah sebagai pemberian dalam perkawinan saja untuk membantu biaya pernikahan (*walimatul Ursy*). Namun yang terjadi permintaan tersebut ditentukan jumlahnya oleh pihak perempuan

meskipun ada mufakat tetapi tetap pihak perempuan yang menentukannya. Penetapan uang *hantaran* nikah tersebut relatif tinggi jumlahnya sehingga berakibat pernikahan dibatalkan apabila tidak terpenuhi permintaan tersebut. Sehingga berbagai cara dilakukan seseorang agar tetap terpenuhi permintaan tersebut dan akhirnya banyak menimbulkan dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya sementara dalam Islam menikah itu dianjurkan untuk dipermudah bukan dipersulit. Oleh karena itu berdasarkan realita tersebut, penulis dapat ambil kesimpulan bahwa tradisi penetapan uang *hantaran* nikah ini hukumnya makruh, namun apabila sampai menyebabkan seseorang melakukan perzinaan maka tradisi ini hukumnya haram untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan uang *hantaran* nikah yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya.

Akhirnya penulis dapat simpulkan, apabila seseorang ingin menerapkan tradisi ini dalam pernikahan boleh saja dengan syarat tidak adanya penetapan jumlah uang *hantaran* nikah tersebut dan adanya unsur sukarela antara kedua belah pihak serta tidak merugikan dan memberatkan satu sama lainnya. Disamping itu juga bagi pihak lak-laki perlu juga memperhatikan unsur *kafaah* dalam pernikahan sebagai bahan pertimbangan sebelum menikah agar tercipta keluarga harmonis dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENETAPAN UANG *HANTARAN* NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”**.

Shalawat serta salam, semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menghantarkan umat manusia dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang, yaitu *addin al-Islam*. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syarifuddin (Alm) semoga segala amal ibadahnya diterima dan ditempatkan yang layak di sisi Allah SWT. dan Ibunda Prehaten yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta kakanda tercinta Lu'i Afwani, S.Pd yang telah sabar dan bersusah payah dalam membantu memenuhi segala kebutuhan penulis, selalu memberikan motivasi serta dengan iringan do'a keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus pembimbing skripsi yang dengan sabar dan bijaksana membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Lurah Pulau Kijang beserta stafnya serta masyarakat Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang telah membantu dalam memberikan keterangan dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan perpustakaan UIN Suska Riau dan juga pimpinan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah memfasilitasi dalam memberikan pinjaman buku sebagai sumber dan literatur-literatur untuk penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh Dosen pengajar beserta staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
9. Teman se-angkatan 2008 wa bil khusus teman se- jurusan Ahwal Al Sakhshiyah yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semuanya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya. Amin ya robbal 'alamin...

Pekanbaru, April 2013

Dimas Prawiro

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM KELURAHAN PULAU KIJANG	14
A. Sejarah Kelurahan Pulau Kijang	14
B. Keadaan Geografis dan Demografis	15
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UANG <i>HANTARAN</i> NIKAH	30
A. Pengertian Uang <i>Hantaran</i> Nikah	30
B. Kegunaan Dan Tujuan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	42
C. Bentuk Dan Jenis <i>Hantaran</i> Nikah	45
BAB IV UANG <i>HANTARAN</i> NIKAH DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	48
A. Ketentuan Pembiayaan <i>Walimatul ‘Ursy</i> di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	48

B. Pelaksanaan dan Dampak Penetapan Uang <i>Hantaran</i> Nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penetapan dan Dampak Uang <i>Hantaran</i> Nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
TABEL 2.1 Komposisi Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa	18
TABEL 2.2 Komposisi Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin	19
TABEL 2.3 Komposisi Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Agama dan Penganutnya.....	20
TABEL 2.4 Sarana Ibadah di Kelurahan Pulau Kijang	21
TABEL 2.5 Sarana Pendidikan di Kelurahan Pulau Kijang	23
TABEL 3.6 Kegunaan dan Tujuan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	43
TABEL 3.7 Bentuk dan Jenis <i>Hantaran</i> Nikah	45
TABEL 4.8 Sikap Responden Yang Dimintai Uang <i>Hantaran</i> Nikah Tinggi	50
TABEL 4.9 Kegunaan Dan Tujuan Uang <i>Hantaaran</i> Nikah	51
TABEL 4.10 Waktu Permintaan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	53
TABEL 4.11 Pelaku Yang Menyerahkan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	54
TABEL 4.12 Jawaban Respon Tentang Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Jumlah Permintaan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	55
TABEL 4.13 Cara Memenuhi Permintaan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	56

TABEL 4.14	
Jumlah Uang <i>Hantaran</i> Nikah	57
TABEL 4. 15	
Jawaban Responden Tentang Informasi Pembatalan Nikah Akibat Permintaan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	58
TABEL 4.16	
Jawaban Responden Tentang Informasi Penundaan Nikah Akibat Permintaan Uang <i>Hantaran</i> Nikah	58
TABEL 4.17	
Akibat Tradisi Uang <i>Hantaran</i> Nikah Terhadap Pernikahan	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹ Nikah secara bahasa mempunyai arti hakiki dan majazi, arti hakiki nikah ialah bergabung sedangkan arti majazi nikah ialah *al watha'* yang berarti bersetubuh. Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan sunatullah dan sunah Rasul. Sunatullah berarti sesuai dengan kodrat dan Iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³ Untuk itu Nabi menganjurkan untuk menikah sebagaimana sabdanya:

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : : مشي مع عبد الله بمنى فلقه عثمان
معه يحدثه فقال له عثمان : يا ابا عبد الر : لا تزوجك جارية شابة ؟ لعلها تنكرك بعض ما مضى من
، : : ، : يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فاعنه ، ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاعنه له وجاء .

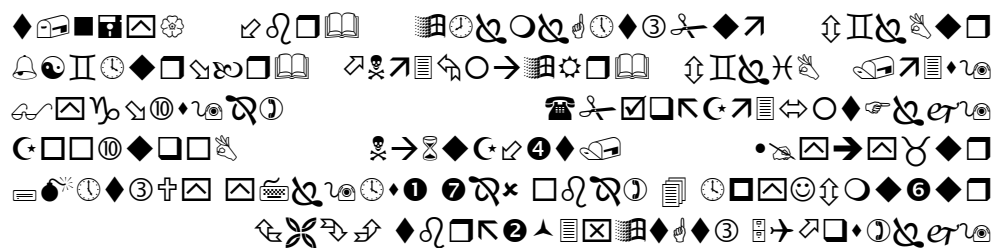
¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1074

² Seri perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 7

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 76

“Artinya: Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, dari Al Qamah *radhiyallahu ‘anhu*, dia telah berkata: “aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*. Kami bertemu dengan Usman *radhiyallahu ‘anhu* yang kemudian menghampiri Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*. setelah berbincang-bincang beberapa saat, Usman *radhiyallahu ‘anhu* bertanya: wahai Abi Abdirrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seseorang perempuan muda, mudah-mudahan perempuan itu akan mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah? Mendengar tawaran itu Abdillah *radhiyallahu ‘anhu* menjawab: “apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kepada kami: “wahai golongan pemuda! Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu penawar hawa nafsu.”HR.Mutafaqun ‘alaih.⁴

Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah(2): 21



“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadaknya⁵.

Mahar (maskawin) yang secara terminologi syari’at berarti kompensasi atau ganti dalam nikah atau lainnya (yang wajib diberikan) dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atas keridhaan kedua belah pihak

⁴ KH. Ahmad Mudjab Mahalli, H. Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadis-hadis Mutafaq ‘Alaih* (Bagian Munakahat dan Mu’amalat), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33-34

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*, alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2, h. 432

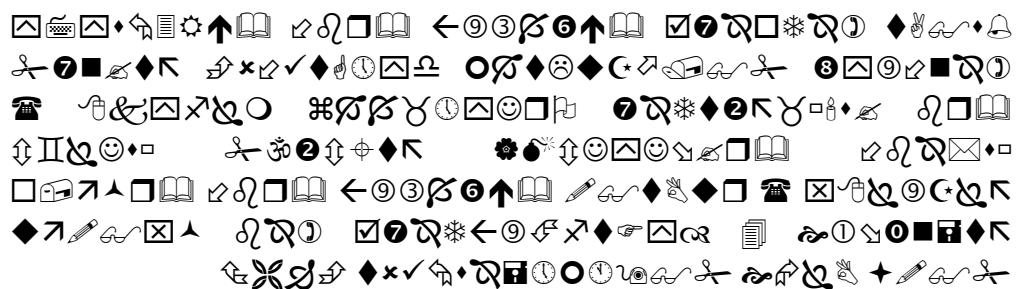
(mempelai pria dan wanita). *Mahar* (maskawin) dikenal juga dengan istilah *ujr* (upah), *faridhah* (kewajiban), dan sejenisnya⁶. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *mahar* adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah⁷. Dasar hukum maskawin yaitu terdapat pada Q.S An Nisa' (4) : 4



“Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Pada umumnya *mahar* itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang yang berharga. Namun syari’at Islam memungkinkan *mahar* itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, ini adalah pendapat Jumhur Ulama.

Berdasarkan Q.S Al Qashash (28): 27



“Artinya: Berkatalah dia (Syu’aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak

⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Ed, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 2, h. 250

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit* , h. 965

hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiah tersebut kemudian ia menjadi *Ummu Al Mu'minin*.⁸

Adapun jika *mahar* tersebut dalam bentuk uang maka Nabi menghendaki supaya *mahar* tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana. Sabda Nabi dari Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim.

عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترض
ترضين : نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها
صداقا ولم يعطها شيئا , وكان ممن شهد الحد بيبة , وكان من شهد الحد بيبة له سهم بخير , فلما حضرته
: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلا ذ ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا
واني أشهدكم اني أعطيتها من صداقها سهمي بخير فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف قيل: خير النكاح
أيسره.

"Artinya: Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya Rasulullah SAW. Berkata kepada seorang laki-laki "apakah engkau senang jika aku nikahkanmu dengan Fulanah?" laki-laki itu menjawab, "ya". kemudian jika aku nikahkan kamu dengan si Fulanah?" sang wanita pun menjawab, "ya". Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar tersebut. Laki-laki tersebut salah seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang Khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata, "Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita dan saya belum menyebutkan besarnya mahar yang harus saya berikan dan saya bersaksi dihadapan kalian semua bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang Khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itupun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu" Dalam riwayat lain ada penambahan redaksi yang berbunyi, "sebaik-baik pernikahan adalah yang mudah maharnya".HR. Abu Daud.⁹

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. 1, cet. 3, h. 92

⁹ M. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*(1), alih bahasa oleh: Tajuddin Arief, Abdul syukur Rozak, Ahmad Rifa'i Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h, 820-821

Berbeda yang terjadi di lapangan, pemberian itu bukan hanya dalam bentuk *mahar* saja tetapi dalam bentuk pemberian lainnya. Seperti yang berlaku di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Pada masyarakat tersebut dikenal dengan permintaan pemberian uang *hantaran* nikah. Uang *hantaran* nikah ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan. Disamping mereka memberikan *mahar*, juga memberikan uang *hantaran* sebelum menikah, yang mana uang *hantaran* ini diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan dari pihak perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik untuk keperluan akad nikah, pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan. Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat tersebut bahkan telah memasyarakat.¹¹

Dalam prakteknya di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai pemberian yang mutlak, bahkan jika seseorang yang ingin meminang seorang gadis yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang *hantaran* tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Seperti kasus yang dialami oleh Mustafa yang ingin menikahi Musdalifah gadis pujaanya. Ketika mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak pria (Mustafa) meminang pihak wanita (Musdalifah) dalam peminangan tersebut ia dimintai uang *hantaran* sebesar Rp. 30.000.000

¹¹ H. Jafar (tokoh adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 03 April 2012

(Tiga puluh juta rupiah), namun ketidak mampuan Mustafa untuk memberikan uang sebesar tersebut akhirnya rencana pernikahan tersebut dibatalkan.¹²

Hal yang sama juga dialami oleh Giat yang tidak jadi menikah dengan Siyah karena ketika peminangan ia dimintai uang *hantaran* dari keluarga perempuan(Siyah) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).¹³

Berbeda sedikit dengan kasus di atas, kasus yang dialami oleh Ihwan dan Slamet yang akan menikahi Sri Wahyuni dan Anisa. Kedua laki-laki ini telah sepakat dengan *hantaran* nikah yang dimintakan kepadanya berupa emas untuk diberikan kepada pihak keluarga mereka. Namun karena adanya permintaan penambahan *hantaran* lagi, sementara dari pihak keluarga laki-laki masing-masing tidak menyetujuinya maka akhirnya pun mereka juga batal untuk menikah.¹⁴

Kemudian mengenai besar kecilnya uang *hantaran* tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap pihak wanita yang menetapkannya bahkan bisa jadi mereka yang berpendidikan tinggi penetapan uang *hantaran* tersebut juga bernilai tinggi.¹⁵ Penetapan uang *hantaran* nikah di Kelurahan Pulau Kijang ini cenderung memberatkan terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Adanya tradisi dan tingginya nilai uang *hantaran* yang harus diberikan ini menyebabkan

¹² Rasiman (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 05 April 2012

¹³ Abdul Kahfi (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 06 April 2012

¹⁴ Sauji (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 07 April 2012

¹⁵ *Ibid*

seseorang enggan untuk melakukan pernikahan bahkan sampai menunda ataupun membatalkannya. Permasalahan-permasalahan semacam ini memberi kesan mempersulit seseorang untuk berniat melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul

”IMPLEMENTASI PENETAPAN UANG *HANTARAN* NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap apa yang diteliti, maka penelitian ini difokuskan pada masalah ketentuan pembiayaan *walimatul ‘urisy* serta pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah bagi masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir serta tinjauan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan pembiayaan *walimatul ‘ursy* di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan *walimatul 'ursy* di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah bagi masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah informasi dan khazanah intelektual bagi penulis dan pembaca dalam hukum Islam terutama dalam masalah uang *hantaran* nikah
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dalam bidang hukum Islam terutama masalah uang *hantaran* nikah
- c. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang penulis laksanakan di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena di tempat tersebut tradisi uang *hantaran* nikah sudah memasyarakat dan sering menjadi penghalang seseorang untuk melangsungkan pernikahannya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang pernah terlibat dalam masalah uang *hantaran* nikah
- b. Objek Penelitian ini adalah pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah bagi masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 3.347 KK. Setelah mengadakan riset ternyata dari jumlah KK tersebut tidak semuanya menggunakan *hantaran* nikah. Oleh karena itu penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang yang pernah terlibat dalam masalah *hantaran* nikah terdiri dari 3 orang tokoh adat, 5 orang tokoh

masyarakat dan 22 orang yang terhalang menikah akibat uang *hantaran* nikah tersebut.¹⁶ Dengan menggunakan teknik *random sampling* (teknik pengambilan sampel dengan cara yang ditentukan oleh peneliti).¹⁷

4. Sumber data

- a. Data Primer yaitu data lapangan yang diperoleh dari subjek penelitian
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian
- b. Wawancara(*interview*) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi(data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.¹⁸
- c. Angket yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berasal dari angket sedangkan data kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data

¹⁶ Junaidi, MA (Kep. KUA Kecamatan Reteh), *Wawancara*, Pulau Kijang: 04 April 2012

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), ed. 1, cet. 1, h. 177

¹⁸ Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), ed. 1, cet. 4, h. 69

kuantitatif tersebut dibentuklah tabulasi(table) kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan. Sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian
- b. Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus
- c. Induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,dan Metode Penelitian

BAB II Tinjauan Umum Kelurahan Pulau Kijang terdiri dari Sejarah Kelurahan Pulau Kijang, Keadaan Geografis dan Demografis, Agama, Pendidikan, Ekonomi serta Adat Istiadat

BAB III Tinjauan Umum tentang Uang *Hantaran* Nikah terdiri dari:

Pengertian Uang *Hantaran* Nikah, Kegunaan dan Tujuan Uang *Hantaran* Nikah, serta Bentuk dan Jenis Uang *Hantaran* Nikah

BAB IV Uang *Hantaran* Nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan

Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari: Ketentuan Pembiayaan *Walimatul ‘Ursy* di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Pelaksanaan dan Dampak Penetapan Uang *Hantaran* Nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Tersebut

BAB V Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM KELURAHAN PULAU KIJANG

A. Sejarah Kelurahan Pulau Kijang

Kelurahan Pulau Kijang mempunyai potensi besar dari keadaan tanah, hasil bumi maupun tenaga kerja dan sangat menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan. Sekitar abad ke-17 datanglah rombongan pasukan Riau yang disebut orang Pesisir Timur dipimpin oleh Tengku Muhammad Shaleh bin Tengku Sulung, mereka itulah yang membangun perkampungan pertama di Daerah Reteh dan sekitarnya. Sehingga terbentuklah sebuah kerajaan Tengku Muhammad Shaleh yang kemudian bergelar Tengku Panglima Besar membangun benteng pertahanan di beberapa tempat, termasuk daerah Desa Benteng sekarang (salah satu nama daerah di Kecamatan Reteh).¹

Pada tahun 1850 M pecahlah perang antara kerajaan Tengku Panglima Besar melawan Belanda dan dalam peperangan ini Tengku Panglima Besar gugur. Sejak saat itu berakhir lah kerajaan Tengku Panglima Besar di Reteh. Selanjutnya daerah Reteh berada di bawah Kesultanan Riau yang dipimpinnya dipegang oleh Tuk Muda Ismail yang datang dari Pulau Penyengat.²

Pada tahun 1876 M berakhir pula Kesultanan Riau di Reteh karena Belanda mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Amir. Pada

¹ Ilhamzah (Lurah Pulau Kijang), *Wawancara*, Pulau Kijang: 15 Juli 2012

² *Ibid*

pemerintahan Amir yang pertama inilah dibentuk berbagai perkampungan di daerah Reteh termasuk kampung Pulau Kijang dengan status kepenghuluan kenegerian Pulau Kijang yang dipimpin oleh Tuk Nawas sebagai kepala negeri yang pertama. Selanjutnya secara berturut-turut yang menjadi wali negeri atau penghulu Pulau Kijang adalah sebagai berikut: Tuk Undik, Tuk Saman, Tuk Meregani, Tuk Manan, Tuk Kalidik, Tuk Naini, Abdul Pangkar, Encik Muhammad dan Ahmad Abdullah.³

Kepala negeri terakhir Ahmad Abdullah yang diangkat sebagai Penghulu sejak tahun 1966-1976 M melalui pemilihan secara langsung. Berlanjut hingga tahun 1981 M tepatnya pada tanggal 9 Juni 1981 kenegerian Riau Pulau Kijang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat atau golongan Pengatur Muda sebagai kepala kelurahan yang pertama.⁴

B. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Pulau Kijang merupakan Ibu kota Kecamatan Reteh, yang mana Kecamatan Reteh terdiri dari sembilan Desa dan tiga Kelurahan. Kemudian secara administrasi Kelurahan Pulau Kijang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Adapun batas wilayah Kelurahan Pulau Kijang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Metro

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seberang Pulau Kijang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung
Provinsi Jambi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Madani

Secara geografis Kelurahan Pulau Kijang berada di belahan bumi bagian Selatan dengan posisi 102^0 - 104^0 BT dan posisi Lintang 0^0 - 20^0 LS. Dengan ketinggian tiga meter dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 200 mm, serta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin laut sehingga curah hujan cukup tinggi.⁵

Kedadaan tanah di Kelurahan Pulau Kijang seluruhnya terdiri dari dataran rendah yang landai, subur dan sangat cocok untuk sejenis tanaman kelapa dan palawija. Tanah sejenis ini terletak lebih kurang 2.000 Meter dari tepi sungai. Prasarana transportasi umum yang dipergunakan adalah sungai. Sungai Gangsal merupakan satu-satunya aliran sungai terbesar dan merupakan perhubungan Desa-desa ke Ibu Kota Kecamatan Reteh dan seterusnya.

Untuk prasarana jalan darat saat ini baru sebagian kecil yang dapat dilalui kendaraan yang mayoritas terdiri dari rawa-rawa dan tanah gambut. Maka sungai-sungai yang terdapat di daerah ini merupakan daerah lautan dan rawa-rawa menyebabkan daerah ini beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

⁵ Monografi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh tahun 2012

Musim penghujan terjadi sekitar bulan September hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi sekitar bulan April hingga bulan Agustus dengan temperatur sedang. Kedua musim tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sebab dalam musim kemarau kegiatan pertanian begitu pesat, sehingga masyarakat dapat mengerjakan pertanian dengan baik sedangkan musim penghujan tidak kalah pentingnya, karena selain untuk menyuburkan juga sebagai sumber air minum bagi masyarakat.

2. Keadaan Demografis

Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang sebagian besar adalah pendatang dari berbagai daerah di Nusantara ini, seperti masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan, suku Minang dari Sumatera Barat, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Banjar dari Kalimantan, dan suku Batak dari Sumatera Utara. Selain itu juga terdapat etnis Cina sedangkan suku Melayu adalah penduduk asli di Kelurahan Pulau Kijang.

Jika dilihat data tentang perkembangan penduduk kelurahan Pulau Kijang dari tahun ke tahun, menunjukkan satu demografis yang meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk diakhir tahun 2010 yang menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Pulau Kijang berjumlah 15.003 jiwa dengan jumlah KK 3.347.⁶

⁶*Ibid*

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan etnis (suku) yang tersebar di Kelurahan Pulau Kijang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2. 1
KOMPOSISI PENDUDUK KELURAHAN PULAU KIJANG
BERDASARKAN SUKU BANGSA

N O	SUKU	FREKWENSI	PERSENTASE	KK
1	Bugis	4263 Orang	28, 41 %	725 KK
2	Banjar	3750 Orang	24, 99 %	675 KK
3	Jawa	2611 Orang	17,40 %	664 KK
4	Melayu	2477 Orang	16,51 %	635 KK
5	Minang	1672 Orang	11,14 %	614 KK
6	Cina	119 Orang	0,79%	23 KK
7	Batak	111 Orang	0,74 %	11 KK
Jumlah		15.003 Orang	100 %	3.347 KK

Sumber Data: Monografi Kelurahan Pulau Kijang Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Pulau Kijang yang terdiri dari berbagai suku bangsa menunjukkan bahwa suku Bugis yang mayoritas mendiami daerah ini sekitar 28, 41 %, suku Banjar sebanyak 24,99 %, suku Jawa sebanyak 17,40 %, suku Melayu sebanyak 16, 51%, suku Minang sebanyak 11, 14 %, etnis Cina sebanyak 0, 79 % dan suku Batak sebanyak 0, 74 %.

Pada mulanya suku Melayu adalah suku yang mayoritas mendiami Kelurahan Pulau Kijang, karena memang suku Melayu adalah penduduk asli di Kelurahan Pulau Kijang. Seiring berjalanya waktu suku Bugis menjadi penduduk yang paling banyak di daerah ini, hal ini dikarenakan pada zaman penjajahan dahulu di daerah Sulawesi Selatan sering terjadi

peperangan baik itu dengan bangsa Belanda dan juga antar etnis sendiri. Sehingga di daerah Sulawesi Selatan ketika itu keadaanya sudah tidak aman lagi dan pembunuhan pun terjadi di mana-mana.

Untuk menyelamatkan diri maka banyak diantara mereka pergi merantau dan meninggalkan tanah kelahiranya salah satunya di Kelurahan Pulau Kijang ini. Mereka merasa lebih aman dan mulai mengembangkan diri. Sehingga semakin lama semakin banyak pula masyarakat Bugis yang merantau ke Pulau Kijang. Walaupun suku Bugis adalah mayoritas di Kelurahan Pulau Kijang tetapi hubungan mereka dengan penduduk asli dan penduduk pendatang biasa terjalin dengan baik.

Selain penduduk Kelurahan Pulau Kijang dapat dilihat berdasarkan suku bangsanya, juga dapat dilihat klasifikasi penduduk di Pulau Kijang berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat tabel berikut ini:

TABEL 2.2
KOMPOSISI PENDUDUK KELURAHAN PULAU KIJANG
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Laki-laki	7.034 Orang	46, 9 %
2	Perempuan	7.969 Orang	53, 1 %
Jumlah		15.003 Orang	100 %

Sumber Data: Monografi Kelurahan Pulau Kijang Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 46, 9% sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 53,1 %

3. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk di Kelurahan Pulau Kijang dapat dijelaskan bahwa pada umumnya menganut agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha.

Adapun mayoritas dianut oleh agama Islam dan sebagian kecil saja menganut agama lain. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kelurahan Pulau Kijang berdasarkan agama dan penganutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

TABEL 2.3
KOMPOSISI PENDUDUK KELURAHAN PULAU KIJANG
BERDASARKAN AGAMA DAN PENGANUTNYA

NO	JENIS AGAMA	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Islam	14.925 orang	99, 48 %
2	Kristen Protestan	30 orang	0, 20 %
3	Kristen Katolik	28 orang	0, 19 %
4	Budha	20 orang	0, 13 %
	Jumlah	15.003 orang	100 %

Sumber Data: Monografi Kelurahan Pulau Kijang Tahun 2012

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 99, 48 % penduduk Kelurahan Pulau Kijang menganut agama Islam. Maka dalam rangka menunjang peribadatan sesuai dengan agama yang dianut, terdapat pula sarana ibadah di daerah tersebut. Jumlah rumah ibadah di Kelurahan Pulau Kijang sebanyak 8 Masjid dan 34 Mushalla atau Surau.

Adapun sarana ibadah di Kelurahan Pulau Kijang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.4
SARANA IBADAH DI KELURAHAN PULAU KIJANG

NO	SARANA IBADAH	FREKWENSI
1	Masjid	8 buah
2	Mushalla	34 buah
3	Gereja	-
Jumlah		42 buah

Sumber Data: Monografi Kelurahan Pulau Kijang Tahun 2012

Kita melihat tingginya persentase yang menganut agama Islam, kemudian di tunjang oleh sarana peribadatan yang ada, tentu ini sangat menunjang dalam rangkaian peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat di daerah ini pada umumnya menganut ajaran mazhab Imam Syafi'i. Adapun mereka menganut ajaran Syafi'i karena sebagian besar ulama di daerah ini bermazhab syafi'i. Masyarakat sangat taat mengikuti pendapat ulama sekalipun alasan dari pendapat ulama tersebut tidak diketahui sama sekali. Dengan arti kata masyarakat memiliki ketaatan yang masih bersifat keturunan, maka pelaksanaan ajaran agama itu masih tetap dilaksanakan sebagaimana adanya.⁷

2. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai,

⁷ H. Jafar (Tokoh agama/adat), *Wawancara*, (Pulau Kijang: 16 Juli 2012)

seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik. Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kelurahan Pulau Kijang masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat, sehingga masih cukup banyak anak – anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah – sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.⁸

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi. Baik secara kuantitas maupun kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di kota kecamatan dan lebih – lebih di kota Kabupaten.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu, sehubungan dengan masalah pendidikan di Kelurahan Pulau Kijang, sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa”tiap-tiap warga negara berhak

⁸Monografi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Tahun 2012

mendapat pengajaran”.⁹ Jadi, ini merupakan kewajiban pemerintah dan sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara ini didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁰ Maka dalam implementasinya, pemerintah telah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan istilah pendidikan formal dan non formal.

Untuk lebih jelasnya tentang wadah pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.5
SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN PULAU KIJANG

NO	SARANA PENDIDIKAN	FREKWENSI
1	SLTA/MA	4 Unit
2	SLTP/MTs	5 Unit
3	SD/MI	5 Unit
4	TK	2 U nit
5	Lembaga non Formal	2 Unit
6	Perpustakaan	1 Unit
Jumlah		19 Unit

Sumber Data: Monografi Kelurahan Pulau Kijang Tahun 2012

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan seluruhnya adalah 19 unit, terdiri dari 4 unit SLTA/MA, 5 unit SLTP/Mts, 5 unit SD/MI, 2 unit TK, 2 unit lembaga non formal(kursus computer, menjahit) dan 1 unit perpustakaan.

4. Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk Kelurahan Pulau Kijang dapat dilihat dari subsektor-subsektor sebagai berikut:

⁹ Undang-undang Dasar 1945, h. 15

¹⁰ *Ibid*, h. 3

1. Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Sawah dan ladang padi di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh merupakan salah satu penghasilan yang potensial. Karena padi merupakan penghasilan masyarakat dan penunjang ekonomi, maka tak heran jika mayoritas penduduk di Kelurahan Pulau Kijang berprofesi sebagai petani. Pulau Kijang merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga dikatakan bahwa Pulau Kijang sebagai Kota Padi dan merupakan lumbung beras daerah Indragiri Hilir.¹¹

Walaupun mayoritas penduduk Pulau Kijang adalah petani, akan tetapi tidak semua para petani tersebut memiliki sawah atau ladang sendiri. Sebagian dari mereka ada juga yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan penyewa atau penggarap, sehingga penghasilan yang mereka peroleh pun berdasarkan kesepakatan antara mereka dengan pemilik sawah dan ladang.

2. Subsektor Perkebunan

Selain sebagai penghasil padi yang cukup besar, Kelurahan Pulau Kijang juga memiliki hasil perkebunan yakni kelapa. Kelapa-kelapa yang dihasilkan di Pulau Kijang ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya saja, namun juga disalurkan ke daerah-daerah lain, bahkan diekspor ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapore. Saat ini penduduk di

¹¹Ilhamzah (Lurah Pulau Kijang), *Wawancara*, Pulau Kijang: 15 Juli 2012

Kelurahan Pulau Kijang selain mengembangkan perkebunan kelapa biasa juga mulai membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Sama halnya dalam bidang pertanian, dibidang perkebunan ini juga tidak semua pekerjaanya mengelola kebunnya sendiri, akan tetapi ada yang hanya sebagai buruh perkebunan.

3. Subsektor Perikanan dan Kenelayanan

Kelurahan Pulau Kijang sebagian diliputi oleh sungai, sebagaimana disebutkan dalam geografi di atas, bahwa di Kecamatan Reteh terdapat sungai Gangsal yang merupakan satu-satunya aliran sungai terbesar di Kecamatan Reteh dan merupakan urat nadi perhubungan antara desa ke desa dan keluar kota Kecamatan sampai kepada daerah lainya di luar Kecamatan Reteh dan seterusnya. Oleh sebab itu wajar saja apabila mata pencaharian penduduk juga sebagai nelayan, menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat penangkap ikan lainya. Selain menangkap ikan di aliran sungai Gangsal, penduduk di Kelurahan Pulau Kijang ada juga yang memiliki kolam ikan untuk memperkembangkan ikan-ikan yang ada.¹²

Salah satu alat transportasi yang sangat penting dalam usaha perikanan dan nelayan ini adalah memiliki kapal dan perahu. Sebab dengan alat transportasi itulah maka seorang nelayan dapat melaut dan mencari ikan, bagaimana mungkin seorang nelayan

¹²*Ibid*

bisa melaut jika mereka tidak memiliki sampan ataupun kapal. Namun tidak semua para nelayan memiliki alat transportasi ini, sehingga diantara mereka ada yang menyewa sampan, kapal untuk pergi mencari ikan.

4. Subsektor Industri Kecil dan Menengah

Subsektor industri kecil dan kerajinan adalah salah satu usaha yang dikembangkan oleh masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang dalam meningkatkan perekonomian mereka agar menjadi lebih baik, walaupun jumlah industri kecil dan kerajinan ini tidak banyak, namun itu cukup membantu dan juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Usaha kerajinan kecil dan usaha rumah tangga yang dikembangkan adalah seperti dalam pembuatan tikar baik tikar yang terbuat dari pandan maupun kerajinan-kerajinan lainnya yang berbahan dasar dari tanaman kelapa yang banyak terdapat di Pulau Kijang. Selain itu juga industri rumah tangga lain seperti pembuatan kerupuk amplang yang dikenal sebagai makanan khas daerah Pulau Kijang.

5. Subsektor Jasa dan Perdagangan

Jasa dan perdagangan tentu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, sebab hal ini juga sangat mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Perdagangan di Kelurahan Pulau Kijang dilakukan juga oleh penduduk, dan mayoritas yang bergerak dalam bidang perdagangan

ini adalah masyarakat pendatang yaitu masyarakat suku Minang dan Bugis. Selain perdagangan terdapat juga bidang jasa. Subsektor jasa dapat dikategorikan kedalamnya yaitu pemerintah atau non pemerintah, jasa dan lembaga-lembaga keuangan, jasa penginapan dan lain-lain.

5. Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang sejak zaman dahulu dikenal sebagai pelaut yang ulung. Dengan perahu layar mereka mengarungi perairan Nusantara ke Barat sampai ke Madagaskar ke Timur sampai ke Irian Jaya dan Australia. Perkembangan suku Bugis terdapat hampir disemua pantai dan pelabuhan Nusantara ini, mereka pada umumnya menetap menjadi penduduk daerah sambil mengembangkan adat istiadat persekutuan. Akibat dari persekutuan mereka terdapatlah seperti Bugis di Pangatan di Kalimantan, Bugis di Johor Malaysia dan sampai ke daerah Riau.

Gelombang pertama pelayaran masyarakat Bugis yang pertama ke daerah Riau terdiri dari empat bagsawan Bugis, yaitu Daeng Marewa, Daeng Cellak, Daeng Kamboja, Daeng Parani. Empat bagsawan tersebut kemudian mengadakan asimilasi dengan suku Melayu Riau, terutama dengan kalangan bagsawan sejak tahun 1822 M, yaitu dengan menikahnya Daeng Cellak dengan adik Sultan Sulaiman. Terutama dari hasil pernikahannya itu telah tampil sebagai generasi Melayu yang sangat kreatif

dalam bidang pemikiran Islam, bahasa dan budaya, seperti Raja Ali Haji yang dikenal dengan tulisanya "Gurindam Dua Belas".¹³

Gelombang kedua terjadi tahun 1959 M, yang akhirnya banyak bermukim di Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Perantau Bugis kedua ini telah menjadi petani kelapa, padi serta pedagang di Kelurahan Pulau Kijang.¹⁴

Masyarakat Bugis yang mendiami Kelurahan Pulau Kijang adalah berasal dari Sulawesi Selatan yang merantau dari beberapa generasi, namun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat suku Bugis yang ada di perantauan tetap berpegang teguh pada adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyangnya. Diantara kegiatan masyarakat yang menunjukkan betapa kuatnya masyarakat Kelurahan Pulau Kijang berpegang pada ketentuan adat istiadat dapat dilihat pada upacara-upacara penting, seperti upacara pernikahan. Salah satu adat yang diwariskan itu adalah tradisi pemberian uang *hantaran* nikah ini. Pada awalnya masyarakat Bugis yang memberlakukan tradisi ini, namun seiring berjalanya waktu tradisi ini juga diikuti oleh masyarakat suku lainnya seperti Jawa, Banjar dan Melayu. Ini disebabkan adanya pernikahan beda suku diantara mereka.¹⁵

Dalam upacara pernikahan ini terdapat tradisi-tradisi yang harus dijalankan baik sebelum terjadinya pernikahan maupun setelah akad nikah terjadi. Diantara tradisi yang harus dijalankan disaat sebelum

¹³ Ilhamzah(Lurah Pulau Kijang), *Wawancara*, Pulau Kijang: 15 Juli 2012

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ H. Jafar(tokoh adat/ agama), *Wawancara*, Pulau Kijang: 10 Oktober 2012

terjadinya pernikahan yaitu pemberian uang *hantaran* nikah. Pemberian ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinannya, masyarakat Kelurahan Pulau Kijang menerapkannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun dalam prosesnya berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat suku masing-masing. Pada suku Melayu diawali dengan *merisik*¹⁶, meminang, mengantar tanda, mengantar belanja kemudian perhelatan pernikahan. Pada saat mengantar belanja inilah disertakan menyerahkan uang *hantaran* nikah. Pada suku Jawa terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pembicaraan, persiapan dan siaga. Setiap tahap ini terdapat prosesi-prosesi yang harus dilalui, diantaranya *srah-srahan*, *asok tukon* yaitu Penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keluarga pengantin wanita. Pada suku Banjar diawali dengan *basasuluh*, *badatang*, *baantaran*, *bapingit*, *badudus*, akad nikah, *maarak* pengantin dan Pengantin *betatai*.¹⁷

¹⁶*Merisik* adalah kegiatan mencari tahu tentang diri si gadis dengan menunjuk seseorang yang dipercaya untuk mencari tahu tentang keadaan si gadis tersebut. (Encik Zulkifli, OK Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru* , (Pekanbaru: Kerjasama pemerintah Kota Pku dan Lembaga Adat Melayu Riau, t.t)

¹⁷ *Basasuluh* adalah proses mencari informasi mengenai latar belakang keluarga yang dilakukan oleh pihak laki-laki, *Badatang* adalah prosesi peminangan secara resmi, *baantaran* adalah prosesi memberikan jujuran, *Bapingit* adalah prosesi mempelai wanita harus mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menempuh mahligai rumah tangga, *Badudus* disebut juga mandi-mandi untuk menyucikan diri calon pengantin, *maarak* pengantin merupakan upacara di rumah pihak keluarga pengantin laki-laki untuk dipersiapkan dibawa ke rumah mempelai wanita, pengantin *betatai* adalah pengantin duduk berdampingan di pelaminan. (Tim Gema Budaya, "Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/11/upacara-resepsi-pernikahan-adat-banjar.html>)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG *HANTARAN* NIKAH

A. Pengertian Uang *Hantaran* Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang *hantaran* nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.¹

Pada dasarnya uang *hantaran* nikah ini merupakan tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh Nenek Moyang masyarakat setempat. Seperti yang berlaku di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini. Mereka mengartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad nikah atau pernikahan, baik itu dalam bentuk uang, emas/perhiasan maupun dalam bentuk pakaian serta perlengkapan lainnya.²

Hantaran nikah atau sering disebut *Seserahan* atau *anteran*, *tukon* (suku Jawa), *Uang antaran/belanja* (suku Melayu), *jujuran* (suku Banjar), *Mappendre duii / duii balanca* (suku Bugis) merupakan simbol persembahan seorang lelaki kepada wanita yang ingin dinikahinya. Besarnya pun beragam, beberapa sesuai permintaan dari pihak wanita. Tradisi Uang *Hantaran* nikah

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766, lihat juga Pater Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press Edisi Ketiga 2002), h. 1665-1666

² Sahri (Tokoh Adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 25 Juli 2012

ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang telah ditetapkan oleh calon mertuanya. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, mempelai pria harus berusaha memenuhi uang *hantaran*, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang tersebut.³

Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Seringkali kita dengar dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Lihatlah bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat *religio-magis*. Pada umumnya di Indonesia suatu perkawinan didahului dengan lamaran. Akibatnya lamaran ini pada umumnya bukan perkawinan, akan tetapi pertunangan dahulu. Pertunangan baru terikat apabila(seringkali) dari pihak laki-laki sudah diberikan *panjer*, *peningset*(Jawa-Tengah-Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *panyangcang*(Jawa Barat), *Paweweh*(Bali), di Tnganan

³ *Ibid*

pagringsingan (Bali) namanya pertunangan *masaweh*, artinya meletakkan suatu tanda larangan dengan memberikan sirih. Teranglah bahwa dasar pemberian panjer adalah suatu perbuatan *religio-magis*.⁴

Perkawinan pada masyarakat patrilineal merupakan perkawinan yang didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si istri tersebut akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. Corak utama dari perkawinan pada sistem kekeluargaan patrilineal ini adalah disertai dengan pembayaran perkawinan. Maksud dari pembayaran perkawinan(*jujur*) oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekuensi dari keadaan itu, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggotanya. Oleh karena itu apabila perkawinan dilakukan tanpa pembayaran perkawinan(*tanpa jujur*), maka perkawinan yang demikian itu dikandung maksud untuk mengambil si suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si istri akan berkedudukan tetap sebagai anggota klenya dan anak-anak yang akan lahir dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui garis keturunan ayahnya(yang pada dasarnya telah

⁴Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. 3, h. 100-101

menjadi anggota klen istri sehingga praktis ayahnya itu merupakan anak laki-laki dari ayahnya si istri).⁵

Berbeda dengan prinsip garis keturunan matrilineal yang pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut ibu. Oleh karena itu dalam perkawinan si istri tetap tinggal dalam klan atau golongan famili. Di sini berlaku, bahwa si suami tidak masuk dalam clan atau golongan si istri, melainkan tetap tinggal dalam clanya sendiri. Si suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si istri sebagai orang semando (ipar). Di waktu pelaksanaan perkawinan, ia dijemput dari rumah(*dijampuiq*) dengan sekedar diadakan upacara untuk melepaskan kepergiannya(adat melepas mempelai). Walaupun mungkin didalam perkawinan ini terdapat hadiah-hadiah perkawinan, namun hadiah-hadiah itu tidaklah sama halnya dengan pembayaran perkawinan(*jujur*) seperti pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal.⁶

Selain itu juga dalam masyarakat adat juga dikenal dengan perkawinan bilateral atau parental yang pada dasarnya dibangun atas dua sisi(pihak ayah/bapak dan ibu/istri), perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya adalah bahwa setelah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan si istri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga halnya terdapat anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan

⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 240

⁶ *Ibid*, h. 242

itu.⁷ Istilah *uang antaran* (Melayu), *tukon* (Jawa) merupakan pembayaran perkawinan yang sesungguhnya tidak ada lagi hubungannya dengan fungsi jujur dalam arti sebenarnya. Juga *jinamee* (Aceh), *pekain* (Dayak di Kapuas Udik), *sunrang*, *sompa* (Sulawesi Selatan), *hoko* (Minahasa-Sangihe Talaud), pada dasarnya hanyalah merupakan pemberian perkawinan saja.⁸ Seperti yang berlaku pada masyarakat Kelurahan Pulau Kijang ini, istilah uang *hantaran* nikah merupakan uang sebagai pemberian perkawinan saja. Hal ini disebabkan sering terjadinya perkawinan silang atau perkawinan antar suku, sehingga fungsi *hantaran* nikah atau *jujuran* yang sebenarnya tidak ada lagi. Selain itu juga tradisi ini sudah menjadi kebiasaan setiap suku yang ada di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Indragiri Hilir.⁹ Istilah uang *hantaran* nikah yang dalam masyarakat Banjar setempat disebut *jujuran*, suku Melayu disebut *uang belanja/antaran*, pada suku Bugis disebut *mappendre duii* merupakan uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun yang terjadi dimasyarakat Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini, pemberian tersebut relative mahal sehingga menyebabkan gagalnya seseorang untuk menikah akibat tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Adapun urutan adat pernikahannya sebagai berikut:

1. Adat perkawinan suku Melayu

Sebelum melakukan upacara perkawinan/pernikahan haruslah melalui beberapa tahapan kegiatan yang secara umum adalah:

⁷*Ibid*, h. 243

⁸*Ibid*

⁹ Sahri (Tokoh adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 10 Oktober 2012

1. *Merisik*

Merisik merupakan upaya mencari jodoh dengan cara mencari tahu tentang keadaan si gadis tersebut maka ditunjuklah seseorang yang dipercaya untuk mencari tahu tentang keadaan si gadis tersebut. Kegiatan mencari tahu tentang diri si gadis ini dilakukan tidak dengan terang-terangan untuk mencari jodoh, melainkan secara terselubung. Misalnya dalam sindir dan kias yang khusus dimiliki oleh orang yang ditunjuk tersebut.¹⁰

2. *Meminang*

Setelah pihak lelaki semufakat untuk menjodohkan anak lelakinya dengan si gadis yang telah disepakati, maka dikirimlah perutusan ke rumah si gadis untuk meminang atau melamar si gadis secara resmi. Perwakilan tersebut terdiri dari beberapa orang yang dituakan dan seseorang juru bicara. Pada pelaksanaan peminangan ini ada kalanya pihak wanita tidak langsung menjawab atas pinangan ini, melainkan meminta waktu beberapa hari untuk menjawabnya dan kepada pihak laki-laki diminta datang kembali pada hari yang ditentukan dan sebaliknya adapula jawaban diberikan pada saat peminangan itu.¹¹

3. *Mengantar tanda (bertunangan).*

Setelah peminangan diterima, maka akan dilakukan acara mengantar tanda sebagai ikatan tali pertunangan. Setelah pihak wanita menyatakan menerima atas pinangan pihak lelaki, maka pihak lelaki

¹⁰Encik Zulkifli, OK Nizami Jamil, *Op. Cit*, h. 2-4

¹¹*Ibid*, h. 5

kembali mengirim perutusan kerumah pihak wanita untuk menyampaikan tanda ikatan untuk kedua anak mereka. Sebagai tanda ikatan perjodohan selalu dipersiapkan sebetuk cincin emas dengan ukuran sesuai dengan tingkat sosialnya.¹²

4. Mengantar belanja

Upacara mengantar belanja ini dilaksanakan tidak begitu lama dengan waktu pelaksanaan akad nikah, biasanya paling lama dalam hitungan bulan. Namun ada pula pelaksanaan antar belanja ini dilaksanakan bersamaan dengan hari akad nikah yaitu sebelum akad nikah dilaksanakan. Upacara mengantar belanja adalah kedatangan perutusan keluarga calon pengantin lelaki ke rumah calon pengantin wanita untuk menyerahkan uang belanja sebagai bantuan untuk biaya pelaksanaan upacara pernikahan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kesanggupan calon pengantin lelaki. Mengantar uang belanja ini dilengkapi pula dengan bahan pengiring berupa berbagai barang-barang keperluan calon pengantin wanita yang juga disesuaikan dengan kemampuan pihak lelaki.¹³

5. Perhelatan pernikahan

Setelah pihak wanita menerima antaran belanja maka mulailah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari perkawinan seperti membersihkan dan merapikan rumah, melengkapi peralatan yang kurang,

¹²*Ibid*, h. 5-6

¹³*Ibid*, h. 23

mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan hari perkawinan dan lain sebagainya sehingga sampailah saat hari pelaksanaan.¹⁴

2. Adat perkawinan suku Bugis

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya masyarakat Bugis Bone menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sacral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Bone yang disebut "*Appabottingeng ri Tana Ugi*" terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Bugis Bone yang betul-betul masih memelihara adat istiadat. Adapun urutan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. *Mattiro* (menjadi tamu)

Merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan. *Mattiro* artinya melihat dan memantau dari jauh atau *Mabbaja laleng* (membuka jalan). Maksudnya calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan dengan cara bertamu dirumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak, maka akan dilakukan langkah selanjutnya.¹⁵

2. *Mapessek-pessek* (mencari informasi)

Saat sekarang ini, tidak terlalu banyak melakukan *mapessek-pessek* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah

¹⁴*Ibid*, h. 38

¹⁵Ajhi Erika, "*Makalah Tentang Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone*", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adat-masyarakat-bugis-bone/>, h. 2

betul-betul dikenal. Ataupun calon mempelai perempuan telah dikenal akrab oleh calon mempelai laki-laki.¹⁶

3. *Mammanuk-manuk* (mencari calon)

Biasanya orang yang datang *mammanuk-manuk* adalah orang yang datang mapessek-pessek supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanuk-manuk* dengan orang tua si perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta Mallino* (*duta resmi*).¹⁷

4. *Madduta mallino*

Mallino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. Jadi *Duta Mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu *mappesek-pesek* dan *mammanuk-manuk*.¹⁸

5. *Mappasiarekkeng*

Mappasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat. Biasa jua disebut dengan *Mappettuada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain :

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, h. 3

- a. *Tanra esso* (penentuan hari)
- b. *Balanca* (Uang belanja)/ *dui mendre* (uang naik)
- c. *Sompa* (emas kawin) dan lain-lain

Setelah acara peneguhan *Pappettuada* selesai, maka para hadirin disugahi hidangan yang terdiri dari kue-kue adat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis (senang) dikemudian hari.¹⁹

3. Adat perkawinan suku Banjar

Adapun urutan proses upacara resepsi pernikahan adat banjar sebagai berikut:

1. *Basasuluh*

Ini adalah proses pencarian informasi mengenai latar belakang keluarga, biasanya dilakukan oleh keluarga pihak lelaki. Setelah proses *basasuluh* biasanya dilanjutkan dengan proses *batatakun* yang lebih terbuka antar keluarga mengenai perihal kesanggupan ekonomi dan lain-lain.²⁰

2. *Badatang*

Proses ini disebut juga meminang mempelai wanita secara resmi. Biasanya dalam proses ini terjadi perbincangan dalam bahasa banjar dan juga disertai pantun-pantun banjar. Apabila pinangan diterima maka perbincangan akan dilanjutkan dengan memberikan *jujuran*, hari mengantar *jujuran* serta hari pernikahan.²¹

¹⁹*Ibid*

²⁰ Tim Gema Budaya, "Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/11/upacara-resepsi-pernikahan-adat-banjar.html>, h. 1

²¹*Ibid*

3. *Baantaran*

Dalam bahasa Indonesia *baantaran* disebut juga bertunangan. Prosesi ini calon mempelai pria memberikan *jujuran* yang berupa seperangkat alat shalat, perhiasan, perlengkapan *make up*, perlengkapan kamar tidur dan sejumlah uang. Biasanya ibu-ibu yang hadir dalam proses ini. Kesempatan ini digunakan untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai perihal hubungan kedua mempelai yang bertunangan.²²

4. *Bapingit*

Dalam prosesi *bapingit* mempelai wanita harus mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menempuh mahligai rumah tangga. Didalam proses ini wanita tidak boleh keluar rumah untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Wanita juga tidak boleh dikunjungi oleh mempelai pria maupun pemuda lain. Prosesi ini biasanya berlangsung selama tujuh hari. Selama tujuh hari tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan mempelai wanita yaitu betamat Al Qur'an, *batimung* dan *bapacar*.²³

5. *Badudus*

Badudus disebut juga mandi-mandi untuk menyucikan diri calon pengantin. Mandi badudus menggunakan air yang dicampur dengan bunga-bunga serta air jeruk dilengkapi dengan mayang dan air kelapa gading. Dekorasi untuk upacara *badudus* biasanya berwarna kuning, karena bagi masyarakat banjar warna kuning menandakan kebesaran dan leluhuran selain itu masyarakat banjar percaya kain kuning dapat menghindarkan segala

²²*Ibid*

²³*Ibid*

pengaruh jahat, sehingga pakaian yang dikenakan calon pengantin sewaktu *badudus* juga terbuat dari kain kuning.²⁴

6. Akad nikah

Prosesi perkawinan adat Banjar secara garis besar meliputi tiga bagian, yakni manurunkan pengantin laki-laki, *maarak* pengantin laki-laki dan mempelai *batatai bapalimbaian*.²⁵

7. *Maarak* pengantin

Merupakan upacara di rumah pihak keluarga pengantin laki-laki untuk dipersiapkan dibawa ke rumah mempelai wanita. Diawali dengan do'a dan selamat kecil kemudian mempelai pria turun keluar rumah sambil mengucapkan do'a keselamatan diiringi shalawat Nabi oleh para sesepuh serta taburan beras kuning sebagai penangkal bala dan bahaya. Meski acara tampak sederhana dan sangat mudah namun acara ini harus dilakukan mengingat pada masa-masa lalu tidak jarang menjelang keberangkatan mempelai pria mendadak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat gagalnya upacara pernikahan. Do'a dan harapan keselamatan telah ditadahkan oleh kedua tangan, kemudian rombongan pengantin menuju kediaman mempelai wanita. Beberapa puluh meter di depan rumah mempelai wanita berbagai macam kesenian akan ditampilkan menyambut kehadiran rombongan pihak pengantin pria. Diantaranya *Sinoman Hadrah* (seni tari masal sambil mempermainkan bendera-bendera diiringi pukulan rebana), *Kuda Gepang* (hampir sama dengan kuda lumping), juga musik *Bamban* (sejenis Tanjidor Betawi). Mempelai pria

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*, h. 2

melewati barisan *Sinoman Hadrah* dilindungi oleh payung ubur-ubur yang akan terus berputar-putar melindungi pengantin sambil rombongan bergerak menuju rumah mempelai wanita.²⁶

8. Pengantin *Betatai*

Proses akhir dari perkawinan Banjar yaitu *betatai*, upacara bersanding/pesta perkawinan. Ada dua versi sebelum penganti duduk berdampingan di pelaminan.

- a. Versi banjar Kuala, yaitu mempelai pria menjemput mempelai wanita dikamar lalu keluar bersama-sama menuju pelaminan.
- b. Versi banjar Pahuluan, yaitu mempelai pria memasuki rumah mempelai wanita disambut dengan shalawat Nabi dan taburan beras kuning, mempelai wanita telah diambang pintu kemudian mereka bersama-sama dibawa untuk duduk bersanding di atas Geta Kencana, sejenis tempat peraduan (tempat tidur).²⁷

B. Kegunaan Dan Tujuan Uang *Hantaran* Nikah

Uang *hantaran* nikah yang pada masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai pemberian mutlak dan sudah menjadi tradisi pada setiap acara pernikahan. Ini merupakan bentuk pemberian dari seorang pria kepada wanita yang akan dinikahnya, baik itu berupa uang, emas/perhiasan, pakaian maupun perlengkapan lainnya. Dengan adanya tradisi pemberian uang *hantaran* nikah ini yang sejak lama dibangun oleh nenek moyang mereka tentunya sudah dipikirkan nilai dan guna

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*, h. 3

dari tradisi tersebut. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tetapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

Adapun kegunaan dan tujuan uang *hantaran* nikah dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3. 6
KEGUNAAN DAN TUJUAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	KEGUNAAN DAN TUJUAN UANG <i>HANTARAN</i> NIKAH	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Untuk Biaya Pesta	15 orang	50 %
2	Untuk Kebutuhan Pribadi Wanita	10 orang	33,3 %
3	Untuk Biaya Akad	2 orang	6,7 %
4	Lainya	3 orang	10 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 % uang *hantaran* nikah tersebut dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan, 33,3 % untuk kebutuhan pribadi wanita, 10 % untuk keperluan lainya dan 6,7 % untuk biaya akad nikah.

Sebagaimana juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sahri, salah seorang tokoh adat bahwasanya tujuan diberikanya uang *hantaran* nikah adalah untuk membantu keluarga wanita atas dasar permintaan dari pihak wanita tersebut, karena dengan pemberian ini sangat membantu ekonomi keluarganya terutama bagi yang ekonominya menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat mengalokasikanya untuk memenuhi kebutuhan biaya pesta dan kebutuhan calon mempelai wanita. Selain itu juga sebagai harga diri bagi seorang pria yang akan menikahi seorang perempuan.²⁸

Penyampaian uang *hantaran* beserta barang-barang pengiringnya ini disampaikan dalam suatu upacara khusus dan lazimnya disampaikan melalui juru bicara dari masing-masing pihak dalam bentuk pantun yang diawali dengan tukar-menukar tepak sirih yang berisi lengkap, sebagai tanda kesucian hati dari kedua belah pihak. Setelah uang belanja dan barang antaran diserahkan dilanjutkan pembicaraan dengan menetapkan kapan waktu dan tempo berlangsungnya hari perkawinan. Maksud yang terkandung dari pelaksanaan upacara mengantar belanja ini adalah sebagai tanda tanggung jawab dan rasa kebersamaan dari pihak lelaki, terutama dalam iktikat membina

²⁸Sahri(Tokoh adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 12 Oktober 2012

rumah tangga bahagia, rukun damai, *sakinah mawaddah warahmah*. Dan di sini tertanam sifat kegotong royongan.²⁹

Adapun pelaksanaan acara ini adalah penyampaian maksud mengantar belanja yang disampaikan oleh juru bicara dan menyebutkan satu persatu apa-apa yang diserahkan dan sekaligus menetapkan hari pernikahan.³⁰

C. Bentuk Dan Jenis *Hantaran Nikah*

Hantaran nikah yang berlaku di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Inhil ini pada umumnya dalam bentuk materi berharga, baik itu berupa uang, perhiasan/emas, pakaian dan perlengkapan lainnya. Ini dapat kita lihat berdasarkan tabel di bawah ini.

TABEL 3. 7
BENTUK DAN JENIS *HANTARAN NIKAH*

NO	BENTUK DAN JENIS <i>HANTARAN NIKAH</i>	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Uang	17 orang	56,7 %
2	Emas / Perhiasan	8 orang	26,7 %
3	Pakaian	2 orang	6,7 %
4	Perlengkapan lainnya	3 orang	10 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 56,7 % *hantaran* nikah tersebut dalam bentuk uang, 26,7 % dalam bentuk emas/perhiasan, 10 % dalam bentuk perlengkapan lainnya (mencakup *make up* dan kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya), dan sebanyak 6,7 % dalam bentuk pakaian.

²⁹Encik Zulkifli, OK Nizami, *Op. Cit*, h. 25

³⁰*Ibid*

Salim selaku tokoh adat juga mengatakan:” kalau ditanya tentang bentuk *hantaran* nikah, yang biasanya berlaku di sini adalah barang-barang yang berharga dan bernilai seperti uang, perhiasan, itu yang biasanya dijadikan *hantaran* atau jujukan yang diberikan pada waktu lamaran namun ada juga *hantaran* nikah yang dibawa pada saat pesta nikah seperti pakaian, *make up*, dan perlengkapan mempelai wanita diluar permintaan pihak wanita”.³¹

Dari keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa *hantaran* ini pada dasarnya berbentuk barang yang berharga dan bernilai tinggi. Barang yang bernilai tinggi ini sesuai dengan permintaan dari pihak mempelai wanita yang diberikan pada saat lamaran. Namun ada yang dibawa pada saat pesta pernikahan seperti pakaian wanita dan perlengkapan-perengkapan lainnya, ini biasanya diluar permintaan dari pihak wanita.

Menurut kebiasaanya barang-barang antaran ini disamping sejumlah uang juga disertakan barang-barang seperti³²:

1. Sepesalin bahan pakaian kebaya dari tenunan
2. Sepesalin bahan pakaian kebaya dari jenis kain lainya atau lebih
3. Bahan keperluan shalat
4. Tas tangan, selop (sandal), sepatu
5. Handuk mandi
6. Selimut
7. Bahan untuk berhias (alat *make up*)
8. Bungai rampai secukupnya

³¹Salim(Tokoh adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 12 Oktober 2012

³²Encik Zulkifli, OK Nizami Jamil, *Op. Cit*, h. 24

9. Pakaian dalam bahkan ada yang menyerahkan seperangkat peralatan tidur komplit.

Disamping itu juga dilengkapi dengan panganan dan buah-buahan tempatan. Ini semua disesuaikan dengan kesepakatan dan kemampuan. Semua bahan-bahan ini disiapkan dalam suatu wadah yang dihiasi dengan berbagai bentuk. Sedangkan uang *hantaran* nikah sering dibuat kreasi dalam berbagai bentuk seperti bentuk kapal layar, rumah-rumah atau bunga sesuai dengan kemampuan si pengubah memberikan kreasi.³³

Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Pulau Kijang, selain uang *hantaran* nikah juga disertai *isi kamar* (perlengkapan-perengkapan lainnya seperti perlengkapan tempat tidur dan kebutuhan-kebutuhan mempelai perempuan). Biasanya penyerahan ini diberikan pada waktu tertentu seperti pada saat mengantar penganten pada waktu pesta pernikahan untuk barang-barang yang sifatnya ringan.³⁴

³³*Ibid*

³⁴ Salim (Tokoh adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 12 Oktober 2012

BAB IV

UANG HANTARAN NIKAH DI KELURAHAN PULAU KIJANG

KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**A. Ketentuan Pembiayaan Walimatul ‘Ursy Di Kelurahan Pulau Kijang
Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**

Walimah diambil dari kata *walama*, yang artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasangan suami istri. Hal tersebut dikatakan oleh Al Azhari. Tsa’lab berkata, *Walimah* adalah istilah untuk makanan yang khusus dipersembahkan untuk pengantin. *Walimah* tidak untuk yang lainnya”. Namun menurut Syafi’i dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa *walimah* itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi seperti nikah, sunatan (khitan) maupun lainnya. Dan yang terkenal kalau dikatakan secara mutlak, *walimah* dipergunakan dalam nikah dan terbatas dalam penggunaan lainnya.¹ Sedangkan *Al ‘urs* dengan di *dhammah ain fiil*-nya serta huruf *ra* yang disukun adalah pesta perkawinan dan perkawinan itu sendiri. Bentuk jamaknya *A’ras*.² Dengan demikian *walimatul ‘ursy* ialah berkumpulnya dua pasang suami istri dalam pesta perkawinan atau makanan dalam perkawinan. Dalam bahasa sehari-hari disebut pesta perkawinan.

Berkaitan dengan *walimah* tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara *walimah*, meski hanya

¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, alih bahasa oleh: K.H Syarifuddin Anwar, K.H Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, t.th), h. 144

² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh: Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldisar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 492

diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, maka yang demikian itu dibolehkan.³ Yang disunahkan bahwa acara itu diadakan sesuai dengan keadaan suami.⁴

Adapun berkaitan dengan besar kecilnya acara *walimah* yang terjadi pada masyarakat Pulau Kijang ini biasanya tergantung dengan uang *hantaran* nikah tersebut. Karena pada dasarnya ketentuan pembiayaan *walimah* ini diambilkan dari uang *hantaran* nikah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut. Sehingga tidak jarang ketika uang *hantaran* nikah tersebut tinggi maka besar pula acara *walimah* tersebut begitu juga sebaliknya. Pada awalnya sejak masyarakat Bugis datang di Pulau Kijang, uang *hantaran* nikah atau pada suku Bugis disebut *mappendre duii* dalam bentuk kain tenun, senjata-senjata, tanah kebun dan emas. Namun seiring dengan perkembangan zaman *hantaran* nikah tersebut juga mengalami perubahan yakni dalam bentuk sejumlah uang. Dalam menetapkan uang *hantaran* ini menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, namun tetap orang tua dari pihak perempuan yang menetapkan jumlahnya. Apabila jumlahnya telah disepakati maka itulah yang diserahkan oleh utusan pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan tersebut.⁵

Penetapan ini dilakukan pada acara mufakat secara terpisah atau juga sekaligus bersamaan dengan acara peminangan antara kedua belah pihak tetapi keputusan jumlah akhirnya ada pada keluarga pihak perempuan. Apabila dirasakan

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, (Jakarta: Al Kautsar, 2001), h. 132

⁴ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Autar*, alih bahasa oleh: Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 3, h. 500

⁵H. Appak(Tokoh masyarakat Bugis), *Wawancara*, Pulau Kijang: 11 April 2013

terlalu tinggi uang *hantaran* tersebut boleh saja terjadi tawar menawar tetapi tetap keputusan ada pada pihak wanita. Seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

TABEL 4. 8
SIKAP RESPONDEN YANG DIMINTAI UANG *HANTARAN* NIKAH
TINGGI

NO	WAKTU PERMINTAAN	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Memenuhinya	5 orang	16, 7 %
2	Menunda Nikah	7 orang	23, 3 %
3	Menawar	12 orang	40 %
4	Membatalkan Nikah	6 orang	20 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya sebanyak 40 % responden menjawab memilih menawar permintaan tersebut, 23 3 % menunda nikahnya, 20 % membatalkan nikahnya dan 16, 7 % memenuhinya.

Dengan demikian apabila dari pihak perempuan telah memutuskan jumlahnya maka pihak laki-laki harus memenuhinya. Apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya maka tidak jarang pernikahan akan batal. Bagi mereka yang sanggup untuk memenuhinya maka dianjurkan untuk segera membayarnya. Setelah dibayar, maka uang itu dikelola oleh pihak wanita untuk biaya pesta pernikahan dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁶ Seperti di jelaskan pada tabel di bawah ini.

⁶*Ibid*

TABEL 4. 9
KEGUNAAN DAN TUJUAN UANG *HANTARAAN* NIKAH

NO	KEGUNAAN DAN TUJUAN	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Untuk Biaya Pesta	15 orang	50 %
2	Untuk KebutuhanPribadi Mempelai	10 orang	33, 3 %
3	Untuk Biaya Akad	2 orang	6, 7 %
4	Lainya	3 orang	10 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 % uang *hantaran* nikah tersebut dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan, 33,3 % untuk kebutuhan pribadi wanita, 10 % untuk keperluan lainya dan 6,7 % untuk biaya akad nikah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Pulau Kijang pada mulanya uang *hantaran* nikah itu sama halnya dengan pembayaran perkawinan pada masyarakat patrilineal yang bertujuan untuk mengambil istri menjadi klan pihak suami sehingga anak yang dilahirkan mengambil garis keturunan berdasarkan pihak ayahnya. Namun yang terjadi sekarang berbeda dan mengalami perubahan bahwasanya uang *hantaran* nikah itu hanyalah sebagai pemberian saja yang lebih banyak dipergunakan untuk biaya pernikahan dan lain sebagainya. Pada masyarakat setempat terutama masyarakat Bugis, mereka sangat menjunjung tinggi budaya rasa malu (*siri*), sehingga merupakan harga diri apabila dalam pesta pernikahan itu tidak bisa mengundang sanak saudara dan menjamu makanan dalam pesta pernikahan tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah malu dan terjadinya perbincangan dikalangan sanak saudaranya, mereka menetapkan uang *hantaran* nikah yang tinggi untuk pesta

yang besar pula. Selain itu juga adanya permintaan yang relatif tinggi tersebut bertujuan agar seorang laki-laki tidak mudah menceraikan istrinya ketika menjalani bahtera rumah tangga nantinya.⁷

Kemudian dengan alasan untuk biaya pesta pernikahan inilah, dalam menetapkan jumlah uang *hantaran* nikah ini, orang tua pihak perempuan meminta dengan jumlah yang tinggi. Seperti yang dialami oleh Mustafa yang dimintai uang *hantaran* sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) begitu juga Hasyim yang dimintai uang *hantaran* nikah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).⁸

Namun realita yang terjadi pada masyarakat sekarang bahwasanya uang *hantaran* nikah ini menjadi hal yang terpenting dalam acara pernikahan terutama di Kelurahan Pulau Kijang ini. Tradisi ini pada dasarnya telah mengalami perubahan tidak seperti pada awal pertama kali dibawa oleh masyarakat Bugis tersebut, yang pada awalnya hanya masyarakat Bugis yang menerapkan tradisi ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat suku lainya yang ada di Pulau Kijang seperti suku Banjar, suku Melayu dan juga suku Jawa. Ini disebabkan adanya pernikahan silang antara suku Bugis dengan suku lainya, sementara tradisi tersebut tetap dipertahankanya. Akhirnya kebiasaan ini menjadi tradisi di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Inhil, sampai saat sekarang ini dan ini menjadi penyebab dibatalkanya pernikahan jika seorang pria tidak sanggup untuk membayarnya. Untuk itu, jika seorang pria yang telah mampu untuk menikah, mereka harus menyediakan

⁷H. Appak (Tokoh masyarakat Bugis), *Wawancara*, Pulau Kijang: 11 April 2013

⁸Rasiman (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 12 Oktober 2012

sejumlah uang untuk diberikan kepada seseorang yang akan dinikahinya sebagai persediaan atas permintaan uang *hantaran* dari calon mertuanya.⁹

B. Pelaksanaan dan Dampak Penetapan Uang *Hantaran* Nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun penetapan uang *hantaran* nikah ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan terjadi atau juga bersamaan pada saat peminangan. Setelah adanya penetapan jumlah uang *hantaran* nikah tersebut maka dilanjutkan dengan penyerahan uang *hantaran* nikah. Penyerahan ini biasanya dilakukan sebelum terjadinya pesta pernikahan. Karena memang sesuai dengan tujuan awal tadi untuk biaya pesta pernikahan. Waktu penetapan atau permintaan uang *hantaran* nikah ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4. 10
WAKTU PERMINTAAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	WAKTU PERMINTAAN	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Pada Saat Peminangan	14 orang	46,7 %
2	Pada Saat Akad Nikah	1 orang	3,3 %
3	Pada Saat Setelah Peminangan	11 orang	36,7 %
4	Pada Saat Sebelum Pesta	4 orang	13,3
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Inhil dimintai uang *hantaran* nikah tersebut sebelum terjadinya pernikahan yaitu pada saat peminangan sebanyak 46,7 %, pada saat setelah peminangan sebanyak 36,7 %, pada saat sebelum pesta sebesar 13,3 %, dan pada saat akad nikah sebesar 3,3 %.

⁹ *Ibid*

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan responden, salah seorang warga yang terlibat dalam masalah uang *hantaran* nikah sebagai berikut:

“Saya dulu dimintai uang *hantaran* nikah oleh mertua saya pada saat peminangan itu, dan waktu itu juga saya langsung bayar karena sebelumnya memang saya sudah bertanya-tanya pada istri berapa kira-kira nanti yang diminta dan saya langsung menyediakannya. Tetapi sebenarnya boleh saja kita bayar di lain waktu kalau memang saat itu belum tersedia”.¹⁰

Penyerahan uang *hantaran* nikah ini selanjutnya diberikan langsung oleh pihak laki-laki atau utusanya kepada calon mertua. Sebelum penyerahan uang *hantaran* nikah tersebut biasanya mempelai laki-laki/keluarganya menanyakan berapa uang *hantaran* nikah yang harus diberikan, baik itu sebelumnya sudah ditentukan oleh calon mertua maupun melalui kesepakatan kedua belah pihak pada saat itu seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaku yang menyerahkan uang *hantaran* nikah tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini.

TABEL 4. 11
PELAKU YANG MENYERAHKAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	PELAKU	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Calon Mempelai Laki-laki	4 orang	13, 3 %
2	Perantara Pihak Lain	11 orang	36, 7 %
3	Wali dari Laki-laki	7 orang	23, 3 %
4	Keluarga Besar Laki-laki	8 orang	26, 7 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 36, 7 % penyerahan uang *hantaran* nikah itu dilakukan melalui perantara pihak lain, 26, 7 % diserahkan oleh keluarga besar laki-laki, 23, 3 % melalui wali dari laki-laki, dan 13, 3 % diserahkan oleh calon mempelai laki-laki sendiri.

¹⁰ Tarkib(warga), Wawancara, Pulau Kijang: 23 Juli 2012

Penentuan jumlah uang *hantaran* nikah ini juga tergantung pada pendidikan perempuan tersebut. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi, maka tidak jarang orang tuanya meminta jumlah yang tinggi pula. Sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 4. 12
JAWABAN RESPON TENTANG PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN
TERHADAP JUMLAH PERMINTAAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	KATEGORI	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Benar Sekali	5 orang	16, 7 %
2	Benar	18 orang	60 %
3	Kurang Benar	6 orang	20 %
4	Tidak Benar	1 orang	3, 3 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya faktor pendidikan berpengaruh besar terhadap penetapan jumlah permintaan uang *hantaran* nikah tersebut sebanyak 60 % responden menyatakan benar, 20 % kurang benar, 16, 6 % benar sekali dan 3, 3 % tidak benar.

Ini sesuai dengan pernyataan warga yang pernah menikahkan anaknya sebagai berikut:

“ Anak saya ini tamatan bidan, jadi kalau ada yang berani melamar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saya ijin, tetapi kalau tidak sanggup silahkan cari saja yang lain”.¹¹

Dengan adanya permintaan untuk memberikan uang *hantaran* nikah tersebut, maka tidak jarang sebisa mungkin mereka berusaha untuk memenuhinya apalagi jika keduanya sudah saling mencintai. Hal ini menjadi dilema bagi mereka

¹¹ H. Zainal(Warga), *Wawancara*, Pulau Kijang: 22 Juli 2012

yang kurang mampu untuk menikah, karena ia harus meminjam, menjual atau menggadai barang berharga yang dimiliki demi untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4. 13
CARA MEMENUHI PERMINTAAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	CARA MEMENUHI UANG <i>HANTARAN</i> NIKAH	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Memakai uang pribadi	8 orang	26,7 %
2	Menjual barang berharga	10 orang	33,3 %
3	Menggadai barang berharga	5 orang	16,7 %
4	Meminjam orang lain	7 orang	23,3 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 33,3 % cara memenuhi uang *hantaran* nikah tersebut dengan cara menjual barang berharga yang dimilikinya, 26,7 % memakai uang pribadi, 23,3 % meminjam pada orang lain, dan sebesar 16,7 % memenuhi permintaan uang *hantaran* tersebut dengan cara menggadai barang berharga yang dimilikinya.

Permasalahan seperti inilah yang sering terjadi bagi keluarga mereka. Karena demi untuk memenuhi permintaan uang *hantaran* nikah mereka menjual barang berharga yang dimilikinya, seperti sawah dan kebun. Begitu juga bagi mereka yang meminjam kepada orang lain, ini juga akan mempengaruhi keharmonisan keluarganya, karena mereka harus memikirkan untuk mengembalikan pinjamannya tersebut.

Adapun mengenai besarnya jumlah uang *hantaran* nikah tersebut bervariasi jumlahnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.14
JUMLAH UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	JUMLAH UANG <i>HANTARAN</i> NIKAH	FREKWENSI	PERSENTASE
1	1-5 Juta Rupiah	3 orang	10 %
2	6-10 Juta Rupiah	4 orang	13,3 %
3	11-15 Juta Rupiah	8 orang	26,7 %
4	>16 Juta Rupiah	15 orang	50 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Pulau Kijang memberikan jumlah uang *hantaran* nikah >16 juta Rupiah sebesar 50 %, antara 11-15 juta Rupiah sebesar 26,7 %, antara 6-10 juta Rupiah sebesar 13,3 %, dan antara 1-5 juta Rupiah sebesar 10 %.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa permintaan uang *hantaran* nikah yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua relatif tinggi jumlahnya. Tingginya jumlah permintaan tersebut dikarenakan uang *hantaran* tersebut akan dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan. Didukung lagi dengan banyaknya sanak saudara dari keluarga perempuan tersebut yang harus diundang. Oleh karena itu permintaan tersebut besar pula jumlahnya. Hal ini merupakan harga diri bagi pihak perempuan apabila tidak bisa menjamu sanak saudaranya pada saat pesta pernikahan tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah rasa malu (*siri*) dan bahan perbincangan bagi keluarga besarnya, mereka meminta uang *hantaran* nikah tersebut dengan jumlah yang tinggi. Namun akibat dari permintaan uang *hantaran* nikah yang tinggi ini sering terjadi penundaan pernikahan, kawin lari, hamil diluar nikah bahkan sampai pembatalan pernikahan akibat dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhinya.

Hal ini juga sesuai dengan tabel di bawah ini:

TABEL 4. 15
JAWABAN RESPONDEN TENTANG INFORMASI PEMBATALAN
NIKAH AKIBAT PERMINTAAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	KATEGORI	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Sering	5 orang	16, 7 %
2	Pernah	24 orang	80, 0 %
3	Belum Pernah	1 orang	3, 3 %
4	Tidak Pernah	0	0
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas diketahui jawaban responden tentang informasi pembatalan nikah akibat permintaan uang *hantaran* nikah adalah sebanyak 16, 7 % mereka menjawab sering mendengar tentang pembatalan nikah, 80 % pernah mendengar dan 3,3 % tidak pernah mendengar tentang pembatalan nikah tersebut.

TABEL 4.16
JAWABAN RESPONDEN TENTANG INFORMASI PENUNDAAN NIKAH
AKIBAT PERMINTAAN UANG *HANTARAN* NIKAH

NO	KATEGORI	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Sering	6 orang	20 %
2	Pernah	22 orang	73, 3 %
3	Belum Pernah	2 orang	6, 7 %
4	Tidak Pernah	0	0
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden sering mendengar penundaan nikah sebanyak 20 %, 73, 3 % pernah mendengar dan 6, 7 % belum pernah mendengar.

Menurut mayoritas masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, sisi lain adanya tradisi uang *hantaran* nikah ini membantu ekonomi keluarganya, terutama bagi pihak keluarga perempuan. Namun dari pihak laki-laki menjadi dilema apabila

jumlah uang *hantaran* nikah tersebut tinggi. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan seorang warga sebagai berikut:

“Kalau bagi Saya memandang, pemberian uang *hantaran* nikah ini ada kalanya membantu ekonomi ada juga merugikan. Membantu ekonomi bagi mereka pihak perempuan karena mendapat pemberian dari pihak laki-laki apalagi jika ia dari keluarga kurang mampu, tetapi bagi pihak laki-laki, ini merugikan ekonomi keluarganya karena ia harus memberikan uang *hantaran* tersebut, apalagi jika permintaan itu dalam jumlah yang besar”.¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akibat dari pemberian uang *hantaran* nikah ini ada sisi baik dan buruknya, baik karena berpengaruh terhadap kebaikan ekonomi keluarga, dan buruk jika sampai merugikan pihak lain dan mempersulit untuk menikah. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.17
AKIBAT TRADISI UANG *HANTARAN* NIKAH TERHADAP
PERNIKAHAN

NO	AKIBAT TRADISI UANG <i>HANTARAN</i> NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Sangat Mempersulit Nikah	6 orang	21 %
2	Mempersulit Nikah	12 orang	40 %
3	Kurang Mempersulit Nikah	5 orang	16, 7 %
4	Tidak Mempersulit Nikah	7 orang	23,3 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 % akibat tradisi uang *hantaran* nikah ini terhadap pernikahan mempersulit seseorang untuk menikah, 23,3 % tidak mempersulit untuk menikah, 21 % sangat mempersulit, dan 16,7 % kurang mempersulit untuk menikah. Dengan

¹² Fahrudin (warga), *Wawancara*, Pulau Kijang: 25 Juli 2012

demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi uang *hantaran* nikah ini mempersulit seseorang untuk menikah.

Adapun mengenai dampak dari penetapan uang *hantaran* nikah ini dapat dibagi menjadi dua bentuk:

1. Dampak Positif

Adapun yang menjadi dampak positif dengan adanya penetapan dari tradisi pemberian uang *hantaran* nikah ini adalah

1. Membantu Ekonomi Keluarga

Dengan adanya tradisi penetapan pemberian uang *hantaran* nikah ini disatu sisi sangat membantu sebagian ekonomi keluarga perempuan terutama bagi keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, meskipun bagi pihak laki-laki merupakan beban yang harus dibayarkan. Hal ini melihat dari kegunaan dan alokasi dari pemberian uang *hantaran* tersebut yang sebagian besar dipergunakan untuk biaya pesta dan biaya kebutuhan-kebutuhan pribadi wanita. Ini memang akan sangat menjadi masalah jika sampai uang *hantaran* nikah tersebut tidak diberikan. Sehingga pelaksanaan pesta(*walimatul 'ursy*) tidak bisa dilakukan sebagaimana yang diinginkan. Begitu juga dengan biaya pemenuhan kebutuhan pribadi wanita, baik itu untuk membeli perhiasan, pakaian dan lain sebagainya, sehingga dengan pemberian uang *hantaran* nikah ini menjadi sangat berarti. Seperti yang dialami oleh Yana dengan uang *hantaran* nikahnya sebesar Rp. 12.000.000

(Dua belas juta rupiah). Setelah dipenuhi oleh Aripin maka keluarga Yana pun merasa terbantu karena bisa meringankan biaya pernikahannya.¹³

2. Menambah Motivasi Pihak Pria Untuk Giat dan Rajin Bekerja

Dengan adanya tradisi uang *hantaran* nikah yang berlaku di Kelurahan Pulau Kijang ini menambah motivasi pihak pria untuk giat dan rajin bekerja. Hal ini disebabkan, apabila seorang pria yang ingin menikah tetapi tidak memiliki penghasilan ekonomi yang cukup maka tidak akan pernah bisa untuk memenuhi permintaan uang *hantaran* nikah tersebut, jika tidak sanggup maka akibatnya tidak jadi menikah sehingga mau tidak mau ia harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi permintaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Samad yang pernah terlibat *hantaran* nikah bahwasanya ia harus bekerja keras mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan terutama pemenuhan permintaan uang *hantaran* nikah tersebut.¹⁴

3. Mendidik Kebiasaan Hidup Menabung dan Hemat

Dengan adanya tradisi uang *hantaran* nikah ini juga melatih dan mendidik untuk menjadi pribadi yang suka menabung dan berhemat. Karena hanya seseorang yang memiliki materi yang cukup lah yang bisa memenuhi permintaan tersebut, sehingga bagi mereka yang merasa kurang mampu tentu tidak bisa memenuhinya tanpa menabung dan berhemat. Seperti yang dialami oleh Abu yang menikahi Khotimah. Abu yang merasa dari keluarga

¹³Aripin(Anggota masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 21 Oktober 2012

¹⁴Samad(Anggota masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 21 Oktober 2012

kurang mampu berusaha agar bisa menikah ia bekerja dan menabung supaya bisa memenuhi permintaan dari keluarga Khotimah tersebut.¹⁵

2. Dampak Negatif

Disamping dampak positif, tradisi ini juga memiliki dampak negatif diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan dibatalkan

Adanya tradisi penetapan pemberian uang *hantaran* nikah ini menyebabkan jika seseorang telah sepakat untuk meminang calon istrinya ia wajib membayarkan atas permintaan uang *hantaran* nikah yang dimintakan kepadanya. Apabila ia tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut maka akibatnya pernikahan tersebut dibatalkan. Seperti Kasus yang dialami oleh Mustafa dengan Musdalifah yang dimintai uang Hantaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) oleh orang tua Musdalifah. Begitu juga yang terjadi pada M. Wasis yang dimintai uang *hantaran* nikah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) oleh orang tua dari Maisaroh.

2. Pernikahan ditunda

Pernikahan akan ditunda apabila seseorang yang dimintai uang hantaran oleh calon mertuanya pada saat itu tidak bisa menyediakan sejumlah uang atau *hantaran* lainnya, sehingga mereka memberi kesempatan untuk menyediakan uang *hantaran* terlebih dahulu sampai bisa memenuhinya sehingga pernikahan ditunda, apabila ia mampu

¹⁵ Salim (Tokoh adat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 20 Oktober 2012

memenuhinya maka pernikahan akan dilaksanakan namun apabila tidak sanggup memenuhinya maka pernikahan tersebut dibatalkan. Seperti yang terjadi pada Hasyim yang akan menikah dengan Ani. Pada waktu itu calon mertuanya menetapkan uang *hantaran* sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sedangkan Hasyim baru memiliki uang sebesar Rp. 10. 000.000 (Sepuluh juta rupiah) maka pernikahannya ditunda sampai terpenuhi semuanya.

3. Memilih Kawin Lari

Kawin lari juga akan terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita sudah saling mencintai namun terhalang masalah uang *hantaran* yang dimintakan calon mertuanya yang tidak sanggup dipenuhinya. Mereka memilih kawin lari demi bersatunya hubungan mereka dipernikahan. Sehingga sering terjadi nikah siri agar hubungan mereka direstui. Seperti yang terjadi pada pasangan Sahrir dengan Siti. Mereka memilih kawin lari ke Guntung akibat permintaan uang *hantaran* sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) begitu juga yang terjadi pada pasangan Ridho dengan Ana yang lebih memilih kawin lari.

4. Hamil diluar Nikah

Bagi mereka yang sudah saling mencintai yang terhalang uang *hantaran* nikah selain kawin lari, mereka juga terpaksa hamil diluar nikah dengan alasan agar hubungan mereka tetap terjadi. Sebab dengan hamil lebih dahulu mau tidak mau orang tua akan

menikahkannya tanpa memikirkan uang *hantaran* nikah lebih dahulu. Hal ini biasanya dilakukan bagi mereka yang kurang mengetahui ilmu agama tanpa berpikir panjang akibat yang ditimbulkannya. Seperti yang dilakukan oleh M. Ali dengan Lia dan Muin dengan Ulul.

5. Pihak Pria Menjual Barang Berharga

Tradisi uang *hantaran* menjadikan seseorang yang akan menikah harus mempunyai persiapan yang benar-benar mapan. Mapan bukan hanya batin saja tetapi juga lahirnya. Dalam arti apabila seseorang mampu batinnya tetapi lahirnya tidak mampu untuk memenuhinya maka tidak akan bisa ia menikah. Sehingga tidak jarang mereka harus menjual barang berharga yang dimilikinya untuk memenuhi permintaan tersebut, baik itu berupa emas/perhiasan, sawah, kebun dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Benu yang menjual kebunnya untuk memenuhi uang *hantaran* nikah dari mertuanya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Pada awalnya ia sepakat dengan uang *hantaran* sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) tetapi karena adanya permintan tambahan lagi maka terpaksa menjual kebun tersebut.¹⁶

6. Pihak Pria Meminjam kepada Orang lain

Meminjam kepada pihak lain juga menjadi salah satu cara agar bisa memenuhi permintaan uang *hantaran* nikah. Dengan berhutang ini mereka bisa memenuhi permintaan tersebut meskipun setelah

¹⁶Benu (Anggota masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 11 April 2013

menikah mereka harus mengembalikannya. Sehingga akibatnya akan mempengaruhi keharmonisan keluarganya karena harus mengembalikan pinjaman tersebut. Seperti yang dialami oleh Anton yang menikahi Fadila. Anton berusaha memenuhi permintaan dari orang tua Fadila tersebut dengan cara meminjam uang kepada salah seorang *toke* (Bos pedagang Kopra). Akhirnya setelah pernikahan Anton harus membayar pinjaman tersebut dengan cara menjual hasil kebunnya(Kelapa) kepada pedagang tersebut dengan harga yang berbeda dari pasaran.¹⁷

7. Pihak Pria Menggadai Barang Berharga

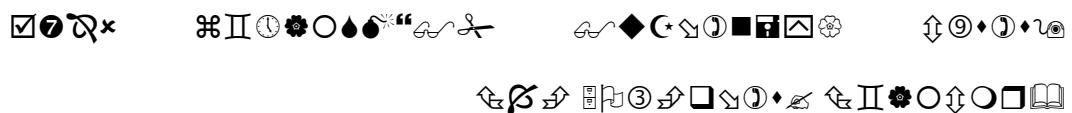
Bagi mereka yang ingin menikah tetapi hanya memiliki barang berharga satu-satunya untuk memenuhi uang *hantaran* nikah, maka mereka menggadai barang tersebut agar bisa memenuhi permintaan tersebut. Akibatnya ini akan menjadi masalah baru setelah pernikahan karena mereka harus mengembalikan gadaian tersebut. Seperti kasus yang dialami oleh Ahmad yang menggadaikan kebun milik keluarganya untuk memenuhi permintaan uang *hantaran* nikah dari orang tua Handayani. Sedangkan kebun tersebut milik bersama. Akhirnya timbul masalah baru yakni sengketa dengan saudaranya mengenai kebun tersebut.¹⁸

¹⁷Anton (Anggota masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 11 April 2013

¹⁸Ahmad(Anggota Masyarakat), *Wawancara*, Pulau Kijang: 11 April 2013

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penetapan dan Dampak Tradisi Uang *Hantaran* Nikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia dan bersifat sakral. Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di Surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S At-Tin, (95) : 4.



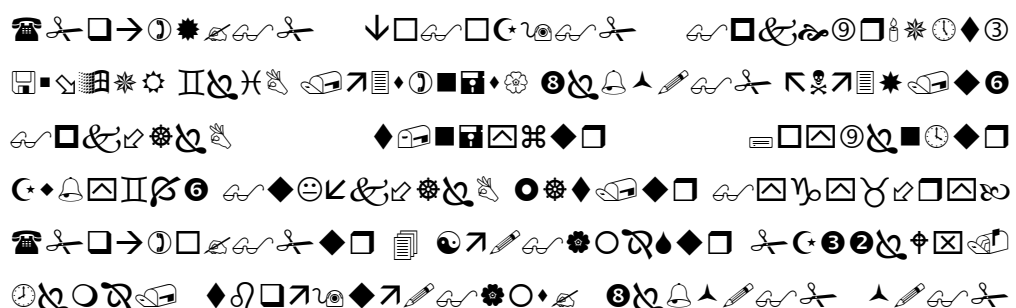
“ Artinya; Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Ayat di atas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriah, yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan – melainkan terutama secara ruhani-nya. Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan

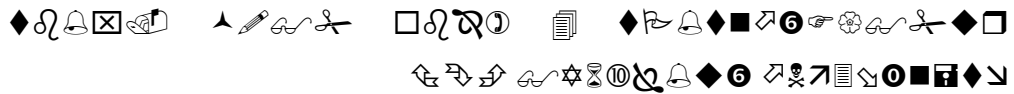
dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu juga perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹⁹

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Q.S An Nisa (4) : 1



¹⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG, 1991), h. 20



“Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dalam peraturan agama pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut. Namun adat istiadat yang membedakannya dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut. Setiap tempat dan suku mempunyai cara tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan tersebut. Seperti yang berlaku di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini. Pada masyarakat ini dikenal dengan istilah uang *hantaran* nikah yang diberikan sebelum terjadinya pernikahan.

Didalam ajaran Islam, masalah pemberian suami dalam perkawinan disebut dengan *mahar* yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰ Selain itu juga ada yang disebut dengan *mut'ah* yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.²¹ Bila ditinjau dari segi kewajiban membayarnya dan akibat yang ditimbulkan, jika *mahar* tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah karena *mahar* merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Sedangkan *mut'ah* merupakan keharusan bagi suami untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan kondisi suami dan istri yang belum diberikan *mahar* tetapi

²⁰ *Ibid*, h. 19

²¹ *Ibid*, h. 20

diceraikan sebelum berhubungan intim. Apabila telah diberikan *mahar musamma* maka separto dari *mahar* itu yang harus diberikan namun apabila telah melakukan hubungan intim maka *mut'ah* tersebut sunah menurut mayoritas ulama.²² Begitu juga dengan uang *hantaran* nikah yang berlaku pada masyarakat Kelurahan Pulau Kijang ini. Jika dalam pelaksanaannya seorang calon mempelai pria tidak bisa memenuhi permintaan uang *hantaran* tersebut maka perkawinanpun tidak akan dilaksanakan secara adat. Penulis memandang kepentingan keduanya dalam perkawinan seakan sama sebagai syarat perkawinan.

Dalam Islam penentuan jumlah *mahar*, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan juga penentuan besaran *mahar* ini berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Pasal 30-31 KHI)²³, begitu juga *mut'ah*, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²⁴ Sementara itu dalam pelaksanaan uang *hantaran* nikah ini, penetapan jumlah uang *hantaran* nikah menjadi domain bagi orang tua mempelai wanita tanpa memandang kesanggupan dari pihak laki-laki. Sehingga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat ekonomi menengah ke bawah sangat berat dan mempersulit seseorang untuk menikah sehingga akibatnya banyak terjadi pembatalan nikah, penundaan pernikahan, kawin lari dan hamil diluar nikah. Nabi menganjurkan untuk menikah sebagaimana sabdanya:

²² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Op. Cit*, h. 490-491

²³ *Ibid*, h. 29

²⁴ *Ibid*, h. 74

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : : مشي مع عبد الله بمنى فلقية عثمان
 معه يحدثه فقال له عثمان : يا ابا عبد الرحمن: لا نزوجك جارية شابة ؟ لعلها تذكرك بعض ما مضى من
 , : : يا معشر الشباب من استطاع
 منكم الباءة فليتزوج. فاعنه , , ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاعنه له وجاء .

“Artinya: Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, dari Al Qamah *radhiyallahu ‘anhu*, dia telah berkata: “aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*. Kami bertemu dengan Usman *radhiyallahu ‘anhu* yang kemudian menghampiri Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*. setelah berbincang-bincang beberapa saat, Usman *radhiyallahu ‘anhu* bertanya: wahai Abi Abdirrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seseorang perempuan muda, mudah-mudahan perempuan itu akan mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah? Mendengar tawaran itu Abdillah *radhiyallahu ‘anhu* menjawab: “apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kepada kami: “wahai golongan pemuda! Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu penawar hawa nafsu.”HR.Mutafaqun ‘alaih.²⁵

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwasanya menikah itu diwajibkan bagi laki-laki yang telah mampu untuk melakukannya dan dikhawatirkan keburukan terhadap dirinya dan agamanya apabila membujang, maka tidak ada jalan lain kecuali menikah.²⁶ Al Qurthubi mengatakan, maksud “mampu” (*istithaa’ah*) di sini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan, bukan kemampuan berhubungan badan. Sedangkan makna *al baa’ah* yang masyhur adalah dengan dibaca *madd* dan adanya *taa’ ta’niits*. Secara bahasa *al baah* berarti jima’ atau berhubungan

²⁵ KH. Ahmad Mudjab Mahalli, H. Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadis-hadis Mutafaq ‘Alaih* (Bagian Munakahat dan Mu’amalat), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33-34

²⁶ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Op. Cit*, h. 405

badan, namun yang dimaksud di sini adalah *mahar* dan nafkah. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya siapa diantara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya maka menikahlah.²⁷

Dari penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan tradisi uang *hantaran* nikah dalam masalah kemampuan seseorang untuk memberikan uang *hantaran* nikah, maka seseorang yang belum mampu memberikan uang *hantaran* nikah yang telah ditetapkan jumlahnya tersebut maka belum diwajibkan untuk menikah selama tidak mengkhawatirkan keteguhan dirinya. Karena kemampuan memberikan uang *hantaran* nikah juga termasuk mampu dalam arti memenuhi biaya pernikahan. Dengan demikian solusinya adalah dengan cara memperbanyak puasa sebagaimana penjelasan hadis di atas. Allah juga berfirman dalam Al Quran, Q. S. AN Nuur (24): 33

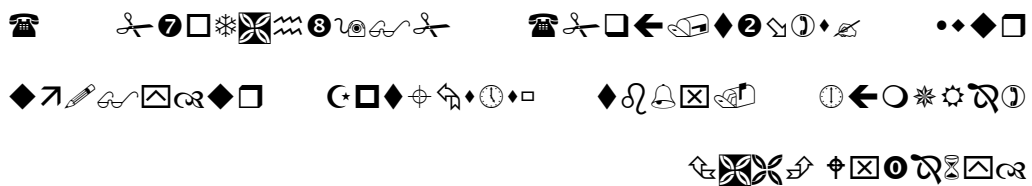


“Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Op. Cit*, h. 257

wanita untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Didalam Islam pergaulan sebagai suami istri sebelum nikah sangat dilarang dan lebih dikenal dengan zina. Larangan ini Allah jelaskan dalam Al Qur'an, Q.S. Al Isra' (17): 32



“Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

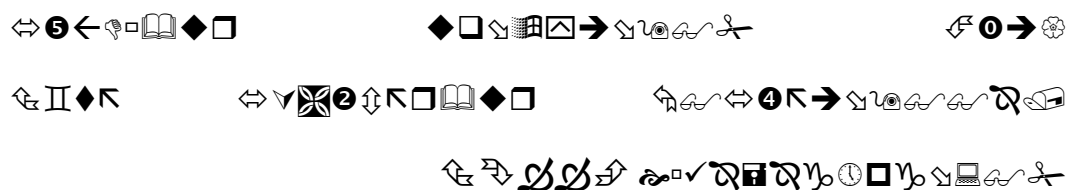
Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan dan dampak dari penetapan uang *hantaran* nikah ini, penulis menganggap bahwa pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah ini banyak yang bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan *mahar* yang kedudukannya sebagai syarat sahnya nikah yang jelas disyariatkan dalam Islam tidak dipaksakan berapa jumlah yang harus diberikan oleh calon suami, apalagi dalam hal uang *hantaran* nikah yang hanya merupakan tradisi. Ini jelas berentangan dengan hukum Islam apabila pemberian itu bersifat memaksa dan harus dipenuhi sesuai dengan permintaan.

Dalam Islam masalah pemberian dalam pernikahan dikenal dengan *mahar* dan *mut'ah*. *Mahar* adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan *mut'ah* adalah pemberian

bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.²⁸

Melihat fenomena penetapan uang *hantaran* nikah ini kemudian membandingkannya dengan *mahar* dan *mut'ah*, maka penulis berkesimpulan bahwa *mahar* dan *mut'ah* tidak bisa dijadikan dasar atau tolak ukur dalam tradisi uang *hantaran* nikah ini meskipun sama-sama pemberian dari calon mempelai laki-laki.

Pada dasarnya Islam dengan ketinggian ajarannya tidak pernah mengenyampingkan atau mengabaikan sebuah tradisi, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Suatu tradisi atau *al 'urf al sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat maka boleh untuk dilakukan. Sebagaimana golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum.²⁹ Mereka berpendapat berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an, Q.S. Al A'raf (7) : 199



“Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kaidah fiqh menyebutkan:

²⁸ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 19-20

²⁹ Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 166

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

“Artinya: Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.³⁰

Bahkan tradisi (*‘Urf*) ini bisa dijadikan produk hukum Islam, yakni selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun sebaliknya Islam menentang jika tradisi tersebut bertentangan dengan syari’at Islam dan tidak memiliki dasar yang kokoh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

“Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan(pertimbangan) hukum”³¹

Memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tradisi uang *hantaran* nikah ini, walaupun mulanya tradisi ini boleh dilakukan yakni selama masih dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, paling tidak dapat penulis simpulkan dengan kenyataan yang ada bahwa tradisi uang *hantaran* nikah ini dihukumi makruh. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan uang *hantaran* nikah yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya. Karena suatu pekerjaan atau perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi akhirnya menimbulkan kerusakan(kemudharatan) maka itu harus dicegah. Sesuai dengan kaidah fiqh :

³⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 87

³¹*Ibid*, h. 78, lihat juga Nashr Farid Muhammad Washil , Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 56

“Artinya: menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.³²

Atau dalam ungkapan lain disebutkan

“Artinya: menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”.³³

Hal ini seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al Salam bahwa tujuan syari’ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan(kemudharatan). Sebagaimana kaidah pokok menyebutkan.

“Artinya: Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat”.³⁴

Sebagaimana juga salah satu kaidah asasi menyebutkan:

الضرر يزال

“Artinya: kemudharatan harus dihilangkan”.³⁵

Disamping itu juga, menurut hemat Penulis dengan adanya ketentuan jumlah uang *hantaran* nikah yang jumlahnya tinggi tersebut memicu seseorang untuk melakukan berbagai cara agar pernikahan tetap terjadi sehingga membuka jalan untuk melakukan kejahatan seperti melakukan kawin lari dan hamil diluar nikah. Sementara dalam Islam, menutup pintu kejahatan (*saddu dzari’ah*) itu diwajibkan untuk mengambil *ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihtiat* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Kewajiban menutup pintu (*saddu dzari’ah*) ini

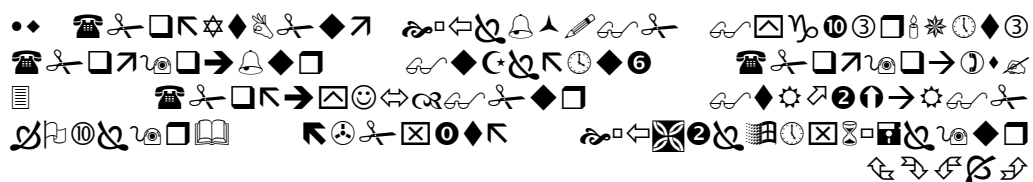
³²*Ibid*, h. 164

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*, h. 6

³⁵*Ibid*, h. 67

sebagaimana Allah jelaskan dalam Al Qur'an, tentang larangan memaki berhala disebabkan oleh Yahudi menggunakan kata-kata *raa 'inaa* itu untuk memaki Nabi, maka orang dilarang mengucapkannya untuk menutup peluang(*saddu dzari'ah*) dari makian mereka terhadap Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an, Q.S. Al Baqarah(2): 104 sebagai berikut:



“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina"³⁶, tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

Namun apabila akibatnya sampai menzalimi dan mendorong orang berbuat dosa dimungkinkan akan terjadi perzinaan, maka tradisi ini dapat dihukum haram karena tidak sesuai dengan syari'at Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam masalah perkawinan tidak mempersulit tetapi malah dipermudah sebab mempersulit dalam masalah perkawinan akan menimbulkan banyak masalah.

Disamping itu Islam juga mengenal istilah *kafa'ah/sekufu* dalam perkawinan. *Sekufu* dalam arti bahasa adalah sepadan, sama atau menyerupai. Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa'ah* dipandang dari sifat *istiqamah* dan budi pekertinya saja. Sedangkan menurut ahli fiqh dari kalangan Hanafi,

³⁶ Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala para sahabat menghadapkan kata Ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata Ini dengan digumam seakan-akan menyebut Raa'ina padahal yang mereka katakan ialah Ru'uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan Raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina.

Syafi'i serta Hanbali yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara kedua calon mempelai dalam lima perkara, yaitu: agamanya, nasab(keturunanya), kemerdekaanya, pekerjaanya(profesi), dan kemudahan dalam harta(kekayaan).³⁷

Jika didapati dari salah satu calon mempelai memiliki satu dari lima kategori di atas, maka kesamaan tersebut telah dianggap terpenuhi. Hal itu tidak berpengaruh pada keabsahan atau sahnyanya akad nikah yang dilakukan. karena sesungguhnya *sekufu* itu tidak termasuk syarat sah nikah, sebagaimana Nabi memerintahkan Fatimah Binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, dan Fatimah pun menikah dengannya. Demikian yang dijelaskan dalam hadis riwayat mutafaq alaih.³⁸ Akan tetapi, kesamaan itu termasuk syarat penting untuk menyempurnakan sebuah akad nikah saja.

Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan tradisi uang *hantaran* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, maka kemampuan seseorang dalam memberikan uang *hantaran* nikah termasuk kategori *kafaah* dalam hal kekayaannya, maka bagi seorang laki-laki yang akan menikah juga harus memperhatikan konsep *kafa'ah* ini. Masalah profesi/ Pekerjaan serta kemampuan pada dirinya(kekayaan) atas segala kemungkinan yang akan diminta pada dirinya juga sangat penting sebagai bahan pertimbangan sebelum meminang seorang

³⁷Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 652, lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh: Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldisar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jil. 5, h. 364

³⁸*Ibid*, h. 653

wanita yang dicintainya. Meskipun pada hakikatnya *kafaah* tidak dipandang dari segi ekonomi seseorang, misalnya dilihat dari besarnya *mahar* wanita tersebut. Seandainya wanita itu menyukai laki-laki yang akan menikahnya dan para walinya juga setuju, maka dengan demikian mereka harus menerimanya atau meninggalkan yang lain. Akan tetapi, *kafaah* hanyalah sebagai bahan pertimbangan saja bagi seseorang yang akan menikah agar tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga dikemudian hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir mengenai implementasi penetapan uang *hantaran* nikah dalam perspektif hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Inhil), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Uang *hantaran* nikah merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang berlaku pada saat seseorang akan menikah. Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan *mahar* dan *mut'ah* dalam perkawinan. Implementasinya di lapangan, mayoritas masyarakat menggunakan uang *hantaran* nikah ini sebagai biaya *walimatul 'Ursy* (pesta pernikahan). Pemberian ini tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk perhiasan maupun perlengkapan-perengkapan lainnya. Besarnya jumlah *hantaran* nikah ini ditentukan secara mufakat tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkannya dengan besaran yang relatif tinggi, sehingga dirasa oleh pihak laki-laki tradisi ini sangat memberatkan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan.

2. Adanya tradisi ini disatu sisi juga memberikan dampak positif dan negatifnya. Adapun dampak positif dari tradisi ini adalah

1. Membantu ekonomi keluarga, terutama keluarga perempuan
2. Menambah motivasi pihak pria untuk giat dan rajin bekerja
3. Mendidik kebiasaan hidup menabung dan hemat

Adapun dampak negatif dari tradisi ini penetapan uang hantaran nikah tidak dipenuhi adalah

1. Pernikahan dibatalkan
 2. Pernikahan ditunda karena tidak dipenuhinya uang *hantaran* nikah
 3. Memilih Kawin Lari
 4. Terjadi hamil diluar nikah
 5. Pihak Pria Terpaksa Menjual Barang Berharga
 6. Pihak Pria Meminjam kepada Orang lain
 7. Pihak pria menggadai barang berharga yang dimilikinya
3. Pada dasarnya Islam tidak pernah mengenyampingkan suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan adat/tradisi bisa dijadikan dasar suatu hukum. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan mudharat maka Islam juga melarang dengan keras untuk tidak melakukannya. Setelah mengkaji berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memahami bahwa tradisi ini dihukumi makruh, namun akan menjadi haram apabila dampak dari tradisi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya. Dengan demikian selama

adat ini masih berdampak positif dan sesuai dengan hukum Islam serta tidak berlawanan dengan hukum Islam, maka tradisi ini diubah untuk dilaksanakannya.

B. Saran

Dari pembahasan serta kesimpulan terhadap implementasi penetapan uang *hantaran* nikah ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pengimplementasian uang *hantaran* nikah ini, bagi masyarakat Kelurahan Pulau Kijang diharapkan perlu mengetahui hakikat uang *hantaran* nikah tersebut. Pada dasarnya uang *hantaran* nikah ini adalah tradisi yang tidak ada ketentuannya di dalam hukum Islam. Uang *hantaran* nikah ini tidak sama dengan *mahar* yang statusnya sebagai syarat sahnya nikah dalam perkawinan. Untuk itu dalam mengimplementasikannya jangan sampai menyebabkan seseorang terhalang untuk menikah bahkan sampai dijadikan alasan untuk mempersulit seseorang untuk menikah. Selain itu juga bagi pihak perempuan juga harus memperhatikan kemampuan pihak laki-laki dalam memberikan uang *hantaran* nikah, begitu juga bagi pihak laki-laki juga perlu memperhatikan unsur *kafa'ah/ sekufu* dalam pernikahan agar pernikahan menjadi harmonis dikemudian hari.

2. Dalam menerapkan tradisi ini, bagi masyarakat Kelurahan Pulau Kijang diharapkan jangan sampai menimbulkan akibat yang negatif, karena jika sampai berdampak negatif maka adat ini tentunya tidak sesuai lagi dengan hukum Islam selain itu juga diharapkan hendaknya selalu mengutamakan kemudahan dalam perkawinan bukan sebaliknya mempersulit dalam perkawinan.
3. Tradisi ini mubah untuk di implementasikan dengan tidak menyampingkan kondisi keluarga dari pihak laki-laki, selama tradisi ini tidak menimbulkan mudharat maka boleh diterapkan. Akan tetapi jika banyak menimbulkan mudharat apabila diterapkan maka adat ini dihukumi haram.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*(5), alih bahasa oleh: Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldisar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Ed. Besus Hidayat Amin, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Al Imam Al Bukhary, *Hadits Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009)

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Ajhi Erika, “*Makalah Tentang Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone*”, artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adat-masyarakat-bugis-bone/>

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), Ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009)

-----, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008)

Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG, 1991)

Encik Zulkifli, OK Nizami Jamil, *Adat Perkawinan dan Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Kerjasama pemerintah Kota Pku dan Lembaga Adat Melayu Riau, t.t)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*, alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, alih bahasa oleh: K.H Syarifuddin Anwar, K.H. Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, t.th)

KH. Ahmad Mudjab Mahalli, H. Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadis-hadis Mutafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*, (Jakarta: Kencana, 2004)

M. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud(1)*, alih bahasa oleh: Tajuddin Arief, Abdul syukur Rozak, Ahmad Rifa'I Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

-----, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa oleh: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Pater Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Modern English Press, 2002)

Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mustofa, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa oleh: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Seri Perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu mubaraok, *Ringkasan Nailul Authar*, alih bahasa oleh: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, (Jakarta: Al Kautsar, 2001)

Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)

Tim Gema Budaya, "*Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar*", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/11/upacara-resepsi-pernikahan-adat-banjar.html>

-----, "*Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar*", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/11/upacara-resepsi-pernikahan-adat-banjar.html>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)